



**PEMIKIRAN A. H. NASUTION TENTANG DWIFUNGSI ABRI
TAHUN 1958-1998**

SKRIPSI

Oleh

**Clara Venia Leilafatkur Rizqi
NIM 130210302012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**PEMIKIRAN A.H. NASUTION TENTANG DWIFUNGSI ABRI
TAHUN 1958-1998**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sejarah (SI) dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

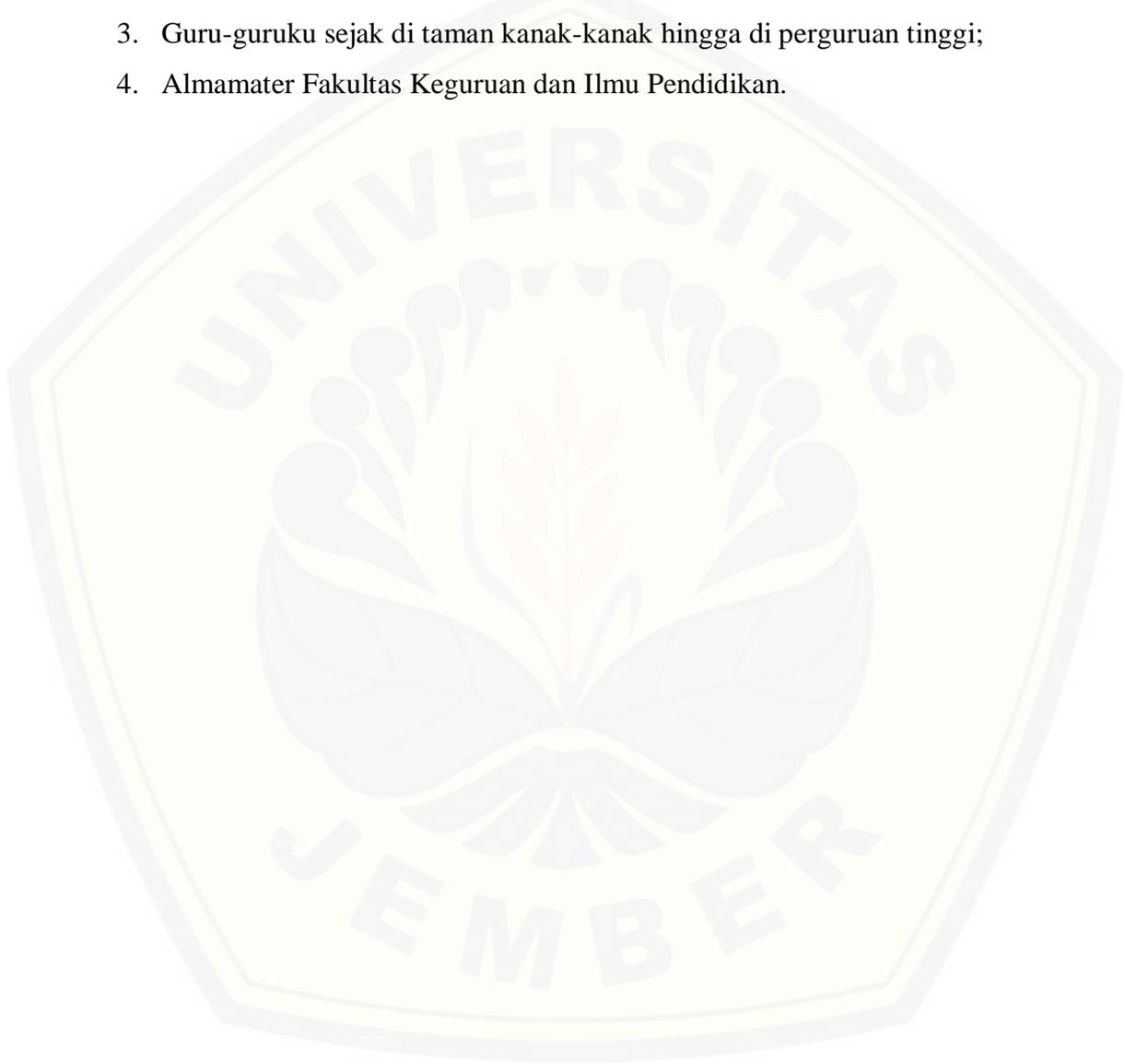
**Clara Venia Leilafatkur Rizqi
NIM 130210302012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk;

1. Ayahanda Hadi Susilo dan Ibunda Lilik Mufarida yang tercinta;
2. Kedua adik laki-lakiku Regi Maulana Aldiano dan Dendi Tegar Setyo bekti;
3. Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga di perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.



MOTO

Tidaklah kita mengatakan bahwa kita berjuang untuk kepentingan rakyat, kalau dalam prakteknya tindakan kita justru mengganggu apalagi melukai hati rakyat

(A.H. Nasution, 1965)



* https://jagokata.com/kata-bijak/dari-abdul_harris_nasution.html

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clara Venia Leilafatkur Rizqi

Nim : 130210302012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pemikiran A.H. Nasution tentang Dwifungsi ABRI 1958-1998” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 September 2020
Yang menyatakan,

Clara Venia L. F. R
NIM. 130210302012

SKRIPSI

**PEMIKIRAN A. H. NASUTION
TENTANG DWIFUNGSI ABRI 1958-1998**

Oleh

Clara Venia Leilafatkur Rizqi
NIM 130210302012

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Marjono, M. Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Kayan Swastika, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pemikiran A.H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998” telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

hari, tanggal :

tempat : Gedung I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Jember.

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Marjono, M.Hum
NIP. 196004221988021001

Drs. Kayan Swastika, M.Si
NIP. 196702102002121002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sumarjono, M.Si
NIP. 195808231987021001

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd.
NIP. 196006121987021001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd.
NIP. 196006121987021001

RINGKASAN

Pemikiran A.H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998; Clara Venia Leilafatkur Rizqi, 130210302012; 2020; xiv + 74 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Latar belakang dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan konsepsi jalan tengah A. H. Nasution yang dianggap memberikan peranan politik kepada tentara. Pidatonya tentang jalan tengah di AMN Magelang pada tahun 1958 banyak di ilhami sebagai dwifungsi yang pengimplementasinya pada masa Orde Baru menjadikan militer berperan dominan di panggung politik Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dikonsepsikan A. H. Nasution tentang keterlibatan tentara dalam politik. A. H. Nasution tidak membenarkan tentara merangkap jabatan dan tidak membenarkan tentara sebagai organisasi terjun dalam kancah politik. Menurut A. H. Nasution ruh dari dwifungsi ABRI sebenarnya terletak pada urusan politik dengan skala besar, seperti ABRI yang menjadi salah satu wakil di MPR, yang mewakili golongan dan dengan kata lain tidak perlu terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Penelitian ini mengkaji beberapa masalah, yakni (1) apa saja yang melatarbelakangi pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958; (2) bagaimana bentuk pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958; (3) bagaimana upaya A. H. Nasution mewujudkan dwifungsi ABRI tahun 1958-1998. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji apa yang melatarbelakangi pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958; (2) untuk mengkaji bentuk pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958; (3) untuk mengkaji upaya A. H. Nasution dalam mengimplementasikan pemikirannya tentang dwifungsi ABRI tahun 1958-1998.

Manfaat yang diharapkan (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pendalaman materi tentang tokoh intelektual Indonesia, yaitu A. H. Nasution dan pemikirannya tentang dwifungsi

ABRI tahun 1958-1998; (2) bagi generasi muda diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran sekaligus untuk menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah dwifungsi dan tokoh dibalik lahirnya dwifungsi. (3) Bagi almamater, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penelitian tersebut akan menambah khasanah keustakaan universitas jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah (1) kondisi sosial budaya (lingkungan) A. H. Nasution adalah seorang Batak muslim, putra seorang aktivis Sarekat Islam dan hidup sederhana sebagai anak pedagang. A. H. Nasution mulai mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di HIS Kotanopan hingga pada saat dewasa A. H. Nasution memilih masuk pendidikan militer. Kondisi politik Indonesia pada masa itu banyak mengalami polemik, keadaan tersebut memunculkan konsepsi oleh A. H. Nasution tentang langkah militer yang dianggap perlu (2) bentuk pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi yang pengimplementasinya jauh dari konsep jalan tengah (3) upaya A. H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi dengan konsep jalan tengahnya.

Pembahasan dalam penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa (1) riwayat perjalanan hidup A. H. Nasution dari kondisi sosial –budaya, politik dan ekonomi dan militer telah membawa beragam pengalaman bagi A. H. Nasution hingga tumbuhnya pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI (2) Dwifungsi yang diharapkan adalah menjadikan jalan tengah yang dikonsepsikannya menjadi ruh dalam pengimplementasiannya (3) memprakaisai kembalinya UUD 1945 sebagai salah satu usaha yang dilakukan, ketika dilucutinya pengaruhnya dalam militer maupun politik A. H. Nasution banyak menulis buku sebagai bentuk kritik terhadap jalannya pemerintah.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan judul “Pemikiran A.H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1945-2000”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata SI pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr, Ir. Iwan Taruna, M. Eng., Selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd., Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dr. Sumardi, M. Hum., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Dr. Nurul Umamah, M. Pd., selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah;
5. Drs. Marjono, M. Hum. dan Drs. Kayan Swastika, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota, yang telah banyak sekali meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk berdiskusi memberikan pengarahan dalam melakukan penulisan skripsi ini;
6. Drs. Sumarjono, M, Si. dan Prof. Bambang Soepeno M. Pd., selaku Dosen Penguji I dan Penguji II, yang telah banyak memberikan saran dan pengarahan dalam ujian skripsi ini;
7. Prof. Bambang Soepeno M. Pd. selaku Dosen Pembing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan saran selama awal perkuliahan samapi akhir.
8. Dosen-dosen pendidikan sejarah yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan selama awal perkuliahan hingga akhir.
9. Kedua orang tua Bapak Hadi Susilo dan Ibu Lilik Mufarida yang telah memberikan banyak doa dan tenaga demi terselesaikannya skripsi ini;

10. Kedua adikku Regi Maulana Aldiano dan Dendi Tegar Setyo Bekti yang telah menjadi motivasi untuk penulis segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabatku Yeni Novita Sari, Dwi Agustin, Lintang Adelia, Siti Jumratul Aini, Rima Wulandari, Tri Wulandari, dan Rizqi Khoirotun Ni'mah yang telah memberikan semangat, dukungan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat;

Setiap karya yang dihasilkan manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka dari itu penulis menerima dengan tangan terbuka segala bentuk kritik yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 16 September 2020

Penulis

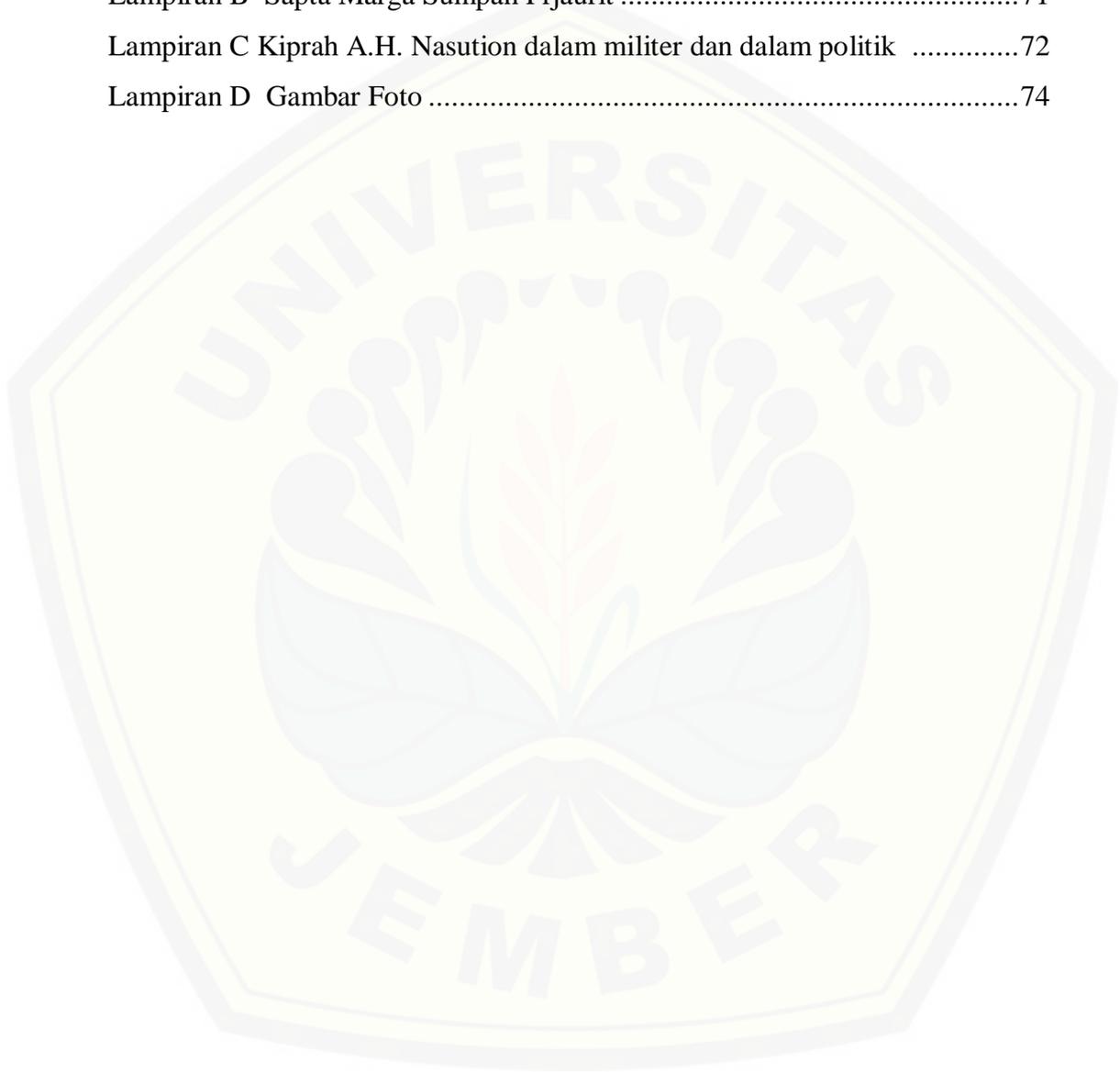
DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB 3. METODE PENELITIAN	22
BAB 4. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN A.H. NASUTION TENTANG DWIFUNGSI ABRI TAHUN 1958	27
4.1 Kondisi Sosial-Budaya	28
4.1.1 Kondisi Lingkungan Keluarga	28
4.1.2 Kondisi Lingkungan Pendidikan	30
4.2 Kondisi Politik	32
4.3 Kondisi Ekonomi	38
BAB 5. PEMIKIRAN A.H. NASUTION TENTANG DWIFUNGSI ABRI TAHUN 1958	41

5.2 Konsep Jalan Tengah A. H. Nasution.....	41
5.3 Landasan Dwifungsi ABRI	45
BAB 6. UPAYA A.H. NASUTION MEWUJUDKAN DWIFUNGSI ABRI SERTA PERKEMBANGANNYA TAHUN 1958-1998.....	48
6.1 Masa Periode Orde Lama	48
6.1.1 Memprakasai kembalinya UUD 1945	49
6.1.2 Doktrin Perang Wilayah	51
6.2 Masa Periode Orde Baru.....	55
BAB 7. PENUTUP	63
7.1 Simpulan	63
7.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Matrik Penelitian	68
Lampiran B Sapta Marga Sumpah Prjaurit	71
Lampiran C Kiprah A.H. Nasution dalam militer dan dalam politik	72
Lampiran D Gambar Foto	74



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai homo sapiens memiliki potensi untuk menyimpan pengalamannya di dalam memorinya atau ingatannya, dan sewaktu-waktu diperlukan dapat dikeluarkan baik dalam angan-angan maupun dalam bentuk cerita. Sejak umat manusia mempunyai kemampuan berbahasa banyak karangan-karangan tentang pengalamannya dituangkan dalam bahasa untuk dapat diketahui pihak lain dan khususnya generasi muda. Sejarah dapat di definisikan sebagai berbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lampau. Setiap pengungkapannya dapat di pandang sebagai sesuatu aktualisasi atau pementasan pengalaman masa lampau (Kartodirdjo, 1992:58-59).

Peran pelaku sejarah sangatlah penting, mereka yang menciptakan rentetan-rentetan peristiwa sejarah yang terjadi, semua hal tersebut merupakan hasil perbuatan manusia yang dipengaruhi oleh pemikiran manusianya, mengingat manusia tidak dapat lepas dengan dunia pemikirannya. Kajian sejarah pemikiran memiliki beberapa tugas diantaranya, yaitu: (1) mengkaji pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah; (2) mengkaji konteks sejarah dengan melihat latar belakang pemikir melalui tempat tinggal serta lingkungan yang telah berpengaruh; (3) mengkaji pengaruh pemikiran di masyarakat (Kuntowijoyo, 2003:189-191).

Kemerdekaan Indonesia dapat diraih dengan meninggalkan jejak-jejak perjuangan para pahlawan. Dalam peristiwa penting yang terjadi, sejumlah tokoh-tokoh perjuangan lahir dengan berbagai cara mewujudkan satu tujuan yakni kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Abdul Haris Nasution Ia adalah seorang jenderal besar dengan segundang pemikiran dan gagasan yang banyak menentukan wajah tentara nasional Indonesia. Ia juga sosok perwira pejuang dengan idealisme dan konsistensi yang mewarnai jatuh bangunnya negeri ini. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah seorang legenda jenderal pejuang dan pemikir, yang jejak-jejaknya menerbitkan rasa kagum.

Nama besar Jendral Abdul Haris Nasution dikenang banyak kalangan lebih dari sekedar pahlawan nasional yang berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Lebih dari itu A. H. Nasution tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu peletak dasar-dasar ketentaraan nasional. Nasution juga dikenang sebagai salah seorang pelaku sejarah yang banyak terlibat dalam banyak peristiwa krusial yang mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Nama A. H. Nasution mulai tercatat tebal dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR yang menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945, pembentukan TKR inilah yang kini diperingati sebagai hari kelahiran Tentara Nasional Indonesia.

Pada Mei 1946 A. H. Nasution yang masih berpangkat kolonel diangkat presiden Soekarno sebagai panglima Regional divisi Siliwangi di wilayah Jawa Barat. Pada masa ini, A. H. Nasution mengembangkan teori perang teritorial untuk menghadapi tentara Belanda yang melancarkan Agresi militer pertama ke wilayah Indonesia. Teori perang teritorial ini dikemudian hari menjadi salah satu doktrin pertahanan tentara nasional Indonesia. Pada 1948 Presiden Soekarno kembali menunjuk A. H. Nasution yang berpangkat kolonel sebagai wakil panglima TKR mendampingi Jendral Soedirman, saat menjadi wakil panglima TKR inilah A. H. Nasution tidak hanya berperan besar dalam mereorganisasi struktur pasukan TKR namun juga mengusulkan strategi perang gerilya TKR untuk menghadapi tentara Belanda.

Semangat juang untuk kemerdekaan dan kecerdasan seorang pemikir yang dimiliki A. H. Nasution telah tertanam sejak ia masih muda. Lahir di kabupaten Mandailing Natal Sumatera utara 03 Desember 1918 dari keluarga Batak Muslim, Nasution muda suda terpesona dengan gagasan-gagasan kemerdekaan Soekarno sejak ia menempuh studi di Bandung Jawa Barat 1935. Setelah lulus putra aktivis Sarekat Islam inisempat menjadi seorang gurudan tinggal didekat rumah pengasingan Soekarno di Bengkulu. A. H. Nasution kerap menyimak pidato dan berbicara dengan Soekarno di pengasingan, Hal ini

membuat minat Nasution muda berubah menjadi lebih tertarik pada politik dan militer.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia Nasution bergabung dengan para bekas tentara PETA dan ikut membentuk TKR, di dunia ketentaraan inilah semangat juang dan kecerdasan Nasution sebagai seorang tentara sekaligus pemikir teruji dengan baik. Pemikiran dan gagasannya banyak mewarnai wajah ketentaraan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Reputasi Nasution sebagai seorang jendral pejuang dan pemikir ini membuat presiden Soekarno yang sempat memecatnya pasca peristiwa 17 oktober 1952 tidak lama mengasingkannya. Pada 27 Oktober 1955 Presiden Soekarno kembali mengangkat sebagai KSAD. Nasution pun melakukan pembaruan dalam tubuh angkatan darat seperti memperkenalkan sistem tour tugas untuk menciptakan tentara yang profesional serta memusatkan latihan militer secara nasional.

Saat masa demokrasi terpimpin yang di perkenalkan presiden Soekarno sejak tahun 1957, A. H. Nasution mendorong para perwira militer masuk ke dunia politik, Nasution juga menganjurkan perwira TNI mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang di nasionalisasi. Langkah ini dianjurkan A. H. Nasution untuk membendung pengaruh partai komunis Indonesia yang semakin kuat di pemerintahan. Pada tahun 1958 A. H. Nasution menyampaikan pidato terkenal yang dikemudian hari kerap dijadikan dalih doktrin dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan orde baru. Dalam pidatonya ini menyatakan agar ABRI mengadopsi “Jalan Tengah” tidak dalam kendali sipil tapi juga tidak boleh mendominasi pemerintahan.

Konsepsi yang dihasilkan A. H. Nasution sampai saat ini menjadi bahan kajian yang terus dibicarakan karena dianggap menjadi embrio dari dwifungsi ABRI yang pengimplementasinya pada masa Orde Baru banyak menemui penyimpangan. A. H. Nasution berpendapat bahwa dalam negara pancasila, tentara Indonesia mempunyai posisi dan peranan sebagai salah satu kekuatan sosial revolusi Indonesia, yang bahu-membahu dengan kekuatan sosial lainnya mempertahankan dan membangun bangsa Indonesia (Nasution, 1977:22). A. H. Nasution juga menekankan Dwifungsi ABRI jangan dieksekusi dan disalah

tafsirkan bahwa seorang anggota ABRI dapat sekaligus merangkap jabatan atau fungsi di bidang eksekutif, legeslatif atau seperti yang sering dikatakan dengan penguasa dan pengusaha. Konsep A. H. Nasution mengenai dwifungsi ABRI yang dikenal dengan *The Army's Middle Way* adalah menekan pada fungsi ABRI sebagai stabilisator, ABRI hanya perlu ikut pembinaan negara bukan untuk mendominasi atau memonopoli kekuasaan, karena hal itu bertentangan dengan Sapta Marga.

Namun pada akhirnya konsep ini menjadi senjata bagi rezim orde baru untuk membenarkan terjunnya militer dalam politik disemua tingkatan. Kebijakan dwifungsi ABRI yang di gunakan pada masa pemerintahan Soeharto ini merujuk kepada pemahaman profesionalisme baru dimana militer yang profesional adalah militer yang memiliki kecakapan, keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab pada bidang hankam dan sekaligus juga pada bidang non-hankam (sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya). Pada akhirnya tujuan awal itu dalam prosesnya mengalami beberapa penyimpangan, seperti dalam bidang ekonomi yang melibatkan ABRI untuk membantu proses nasionalisasi aset penting pemerintah, akan tetapi menjadikan tentara sebagai penguasa aset pemerintah. Dalam perjalanannya hal tersebut digunakan sebagai kesempatan bagi tentara sebagai ladang bisnis. Seperti yang pernah dikemukakan Nasution pada awal perkembangan Dwifungsi ABRI khususnya dalam hal kekaryaan menyatakan bahwa ABRI jangan sampai salah menafsirkan mengenai Dwifungsi ABRI.

Selama lebih dari tiga dasarwarsa doktrin dwifungsi menjadi pilar bagi rezim Orde Baru, dwifungsi yang melenceng jauh dari yang A. H. Nasution konsepsikan. Kritik dan kecaman terhadap keterlibatan politik militer Indonesia, sebenarnya sudah mulai terdengar jauh sebelum jatuhnya rezim Orde Baru. Kritik dan kecaman itu datang dari kalangan sipil tetapi juga dari kalangan purnawirawan, dan semakin buruk sejak reformasi melanda Indonesia setelah berakhirnya rezim Soeharto (Said, 2001:2). Banyak yang menganggap bahwa tentara ber dwifungsi, dapat mengambil peran politik berawal dari konsepsi jalan tengah A. H. Nasution. Perlu diketahui bahwa dwifungsi sendiri pertama kali di cetuskan oleh Presiden Soekarno yang memberi dan melegalkan peranan politik

kepada tentara, dengan menjadikan tentara salah satu golongan karya, disitu tentara menjadi kekuatan politik legal.

Berdasarkan uraian diatas alasan yang mendukung penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap objek kajian mengenai pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958-1998, yaitu tidak terlepas dari konsepsinya yang banyak di pelintir dan disalah salahaftafsirkan. Dalam perjalanannya A. H. Nasution banyak memberikan kontribusi selama masa perjuangan maupun dalam mengisi kemerdekaan, khususnya dalam dunia militer Indonesia A. H. Nasution dikenal sebagai peletak dasar ketentaraan Indonesia. Sosoknya yang idealis dan patriotik membuat apa yang di gagasnya selalu mengedepankan kemajuan dan keamanan bangsa Indonesia.

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah keinginan penulis untuk menambah daftar informasi tokoh pahlawan terkhusus mengenai A. H. Nasution, yang sosoknya dikenal sebagai pejuang dan pemikir. Namun dalam realitanya masih banyak masyarakat, terkhusus para mahasiswa tidak mengenal secara dekat tentang nama besar Jendral Abdul Haris Nasution. Pemikiran, gagasan-gagasan, dan kontribusi begitu banyak dan besar untuk bangsa Indonesia. Selain itu penulis mencoba meluruskan pandangan mengenai dwifungsi yang dikonsepsikan oleh A. H. Nasution yang harus dipaparkan sehingga dapat dipahami garis pembedanya.

Penelitian ini juga dianggap penting karena banyak pemikiran-pemikiran dari A. H. Nasution yang telah banyak mewarnai jalannya pemerintahan pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Sebagai pejuang dan pemikir A. H. Nasution selalu mengawal jalannya pemerintahan, pengalamannya selama hidupnya banyak dituangkan menjadi sebuah karya yang menjadi bukti bahwa A. H. Nasution adalah sosok pejuang yang memiliki intelektual yang tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji Pemikiran A. H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

. Penegasan pengertian judul dalam kajian ini dimaksudkan agar tidak adanya salah penafsiran oleh pembaca mengenai judul yang dimaksudkan oleh

penulis. Judul penelitian ini mengkaji mengenai “Pemikiran A. H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI 1958-1998” berikut garis besarnya.

Pemikiran adalah suatu aksi melalui mana pikiran mendapatkan pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui (poespoprodjo, 1991:174). Setiap individu akan melahirkan pemikiran yang didasari atas pengertian baru terkait dengan perantara yang telah pahami. Pemikiran yang dimaksud adalah pemikiran dari A. H. Nasution seorang tokoh pejuang dan pemikir.

Menurut A. H. Nasution (Said, 2001:1), Dwifungsi berarti dua fungsi bagi militer Indonesia yakni fungsi pertahanan dan fungsi sosial politik. Pemikiran A. H. Nasution lahir ketika A. H. Nasution dihadapkan pada suasana perkembangan politik yang membawa Indonesia mengalami krisis pada pemerintahan yang berdampak pada semua aspek. A. H. Nasution yang tidak senang akan krisis politik yang terjadi di Indonesia pada akhirnya memunculkan pemikiran-pemikiran sebagai langkah politik. Nasution mampu menciptakan konsep berpikir untuk langkah yang harus diambil oleh golongan militer sebagai stabilisator dan dinamisator.

Pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI adalah ide atau gagasan pengambilan langkah sikap militer tentara Indonesia dalam menghadapi krisis berkepanjangan akibat elit sipil tidak mampu mencapai kata mufakat dalam menentukan kebijakannya. Tidak tercapainya kata mufakat dalam menentukan kebijakan politik ini dikarenakan elit sipil selalu mementingkan golongan di atas kepentingan bersama, dan ini menimbulkan perpecahan antar elit sipil (parpol).

Dwifungsi ABRI adalah tentang jiwa dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan rakyat lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik dibidang kesejahteraan nasional, maupun di bidang pertahanan keamanan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945 (Notosusanto, 1985:170).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksudkan oleh penulis mengenai pemikiran “A. H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998” adalah langkah atau peran politik tentara Indonesia yang mengambil jalan

tengah (tidak mendominasi maupun menjadi alat penguasa saja, akan tetapi turut serta menentukan haluan negara) sebagai stabilisator dan dinamisator.

1.3 Ruang Lingkup masalah

Dalam ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk memberi batasan permasalahan, supaya pembahasan dari penelitian ini tidak keluar menyimpang dengan permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis. Penulis dari sini memberi batasan dari pembahasan ini yang meliputi ruang lingkup temporal, spasial, dan materi.

Pertama batasan waktu (temporal) adalah batasan mengenai waktu yang digunakan penulis dalam penelitian berdasarkan pada permasalahan yang akan dikaji. Ruang lingkup temporal pada penelitian ini adalah tahun 1958-1998. Pada tahun 1958 merupakan batas awal dari penelitian ini karena pada tahun 1958 A. H. Nasution berkesempatan menyampaikan pidatonya pada saat Dies Natalis AMN (Akademi Militer Nasional). A.H. Nasution menjelaskan bahwa tentara bukan sekedar alat sipil seperti di negara-negara Barat, dan bukan juga sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara, tetapi sebagai kekuatan sosial yang berkerjasama dengan kekuatan sosial lainnya menentukan jalannya pemerintahan. Apa yang disampaikan A.H. Nasution pada Dies Natalis AMN merupakan hasil dari pengamatannya terhadap kondisi pemerintahan Indonesia yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Isi pidato tersebut pada masa selanjutnya dianggap sebagai konsepsi awal dwifungsi ABRI.

Sedangkan tahun 1998 peneliti gunakan sebagai batas akhir dari kajian penelitian ini, karena pada tahun tersebut dwifungsi ABRI dihapuskan seiring dengan runtuhnya masa kepemimpinan presiden Suharto yang menggunakan dwifungsi ABRI sebagai dasar legitimasi bagi peran sosial politik ABRI yang banyak ditemui penyimpangan-penyimpangan dalam implementasinya. Kedua batasan spasial (tempat) adalah negara Indonesia, dan yang ketiga adalah cakupan materi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemikiran A.H. Nasution terkait dwifungsi ABRI.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958?
2. Bagaimana bentuk pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958?
3. Bagaimana upaya A. H. Nasution dalam mengimplementasikan pemikirannya tentang Dwifungsi ABRI tahun 1958-1998?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini, maka berikut dirumuskan tujuan dalam fokus penelitian, yakni:

1. untuk mengkaji latar belakang pemikiran A.H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958;
2. untuk mengkaji bentuk pemikiran A.H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958;
3. untuk mengkaji Upaya A.H. Nasution mewujudkan dwifungsi ABRI tahun 1958-1998.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. bagi mahasiswa calon guru sejarah, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pendalaman materi tentang tokoh intelektual Indonesia, yaitu A.H. Nasution dan pemikirannya tentang dwifungsi ABRI tahun 1958-1998;
2. bagi generasi muda diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran sekaligus untuk menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah dwifungsi dan tokoh dibalik lahirnya dwifungsi.

3. Bagi almamater, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penelitian tersebut akan menambah khasanah kepustakaan universitas jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengemukakan review yang pernah diteliti dan ditulis oleh peneliti dan penulis terdahulu berkaitan dengan judul “Pemikiran A. H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998” baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan misalnya skripsi dan laporan penelitian, menjadi sumber rujukan penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir yang menjadi syarat untuk kelulusan.

Juliani dalam penelitiannya yang berjudul *Militer dan Politik: Studi Tentang Kelompok Pendukung dan Penentang terhadap Penghapusan Dwifungsi ABRI 1998-2001* (2008:2-6) menjelaskan pertentangan antara pihak yang mendukung dwifungsi ABRI dan pihak yang menuntut penghapusan dwifungsi ABRI. Tuntutan penghapusan dwifungsi ABRI sendiri muncul seiring dengan jatuhnya pemerintahan presiden Suharto yang berkuasa selama 30 tahun. Tuntutan ini tidak lain menginginkan adanya perubahan struktur pemerintahan Indonesia yang telah lama didominasi oleh golongan militer selama kepemimpinan presiden Suharto. Dominasi golongan militer pada struktur pemerintahan yang paling atas hingga bawah membuat elit sipil dibawah partai politik dan organisasi masyarakat di Indonesia pada masa Orde Baru tidak memiliki ruang. Jatuhnya Orde Baru menjadi titik balik elit sipil dan organisasi-organisasi masyarakat menyuarakan penghapusan dwifungsi ABRI untuk mewujudkan demokrasi yang nyata di Indonesia. Kelompok penentang dwifungsi ABRI ini terdiri dari dua golongan, yang pertama adalah golongan yang menginginkan penghapusan dwifungsi ABRI dilakukan secara berkala yang terdiri dari para golongan militer dan masyarakat, kemudian yang kedua adalah golongan yang menginginkan untuk segera dilakukan penghapusan dwifungsi ABRI terdiri dari golongan elit sipil yang kontra, para aktivis dan mahasiswa. Sedangkan kelompok pendukung dwifungsi ABRI sendiri terdiri dari golongan militer, mereka beranggapan bahwa dwifungsi masih dibutuhkan untuk menjaga negara dari ancaman pihak luar dan pembangunan nasional.

Kelebihan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran jelas tentang penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan dwifungsi ABRI yang dijadikan doktrin kepada golongan militer oleh penguasa rezim Orde Baru sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan tersebut akhirnya memicu protes keras dari golongan aktivis dan mahasiswa menuntut agar dwifungsi dihapuskan dan mengembalikan fungsi ABRI yang fokus pada bidang Hankam. Dalam penelitian ini banyak dipaparkan kritikan atas pelaksanaan dwifungsi ABRI oleh kelompok penentang dan hanya sedikit memaparkan dukungan terhadap dwifungsi ABRI. Pada judul penelitian sudah cukup jelas yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengkaji kelompok pendukung dan penentang dwifungsi ABRI yang seharusnya diuraikan secara berimbang. Penelitian ini memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang akan ditulis mengenai lahirnya konsep dwifungsi ABRI sebagai landasan golongan militer berperan dalam bidang sosial dan politik. Namun dalam skripsi tersebut masih belum menjelaskan dwifungsi ABRI secara mendalam, hanya dipaparkan secara garis besarnya saja terlebih mengenai penjelasan khusus dwifungsi dalam pandangan A.H. Nasution belum banyak disinggung.

Hidayat dalam penelitiannya yang berjudul *Kiprah Abdul Haris Nasution Dalam Politik Dan Perkembangan Militer Angkatan Darat di Indonesia Tahun 1945-1966* (2012:1-5) Dalam penelitian ini dijelaskan riwayat singkat A.H. Nasution, tentang kehidupan masa kecil, dimana ia lahir dan mengenyam pendidikan di tanah kelahirannya. Kondisi Indonesia sebagai negara terjajah pada saat itu membangkitkan semangat perjuangan dalam diri A.H. Nasution, keputusannya untuk meninggalkan Sumatera yakni tanah kelahirannya membawa langkah A.H. Nasution untuk masuk dalam militer terwujud setelah ia mengikuti pendidikan di CORO (*Corps Ofleiding Reserve Officieren*). Hingga pada akhirnya TNI lahir sebagai kelembagaan militer Indonesia yang resmi, sebagai wadah yang menampung para prajurit pejuang yang sebelumnya berada dalam wadah-wadah militer bentukan Belanda maupun Jepang. Penelitian ini juga mengkaji tentang langkah awal masuknya militer ke dunia politik, dimana memaparkan peran atau keterlibatan A.H. Nasution dalam politik Indonesia pada saat itu. Kemudian juga

dijelaskan perkembangan militer khususnya Angkatan Darat, tentang latar belakang berdirinya hingga ketegangan-ketegangan yang pernah terjadi dalam tubuh militer Angkatan Darat.

Kelebihan dalam penelitian ini adalah uraian secara sistematis dari kiprah A.H. Nasution dalam perpolitikan Indonesia dan militer, mengenai awal dan latar belakang militer masuk dalam roda perpolitikan. Namun, dalam penelitian ini pemaparan perkembangan militer Angkatan Darat di Indonesia yang menjadi salah satu fokus penelitian ini belum banyak disinggung. Penjelasan perkembangan militer Angkatan Darat hanya dijelaskan secara umum dan hanya fokus pada kiprah A.H. Nasution dalam bidang politik dan kembangan militer. Keterkaitan dari penelitian yang di tulis oleh M. Arief Hidayat dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang A.H. Nasution seorang tokoh besar militer yang banyak berperan pada periode perang kemerdekaan, masa Orde Lama hingga Orde Baru. Dari penelitian ini penulis mencoba untuk memperdalam pembahasan melalui sebuah penelitian yang mana pemikiran A.H. Nasution tentang dwifungsi menjadi fokus utama penelitian.

Istyningrum dalam penelitiannya yang berjudul *Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1997* (2004:1-7) menjelaskan tentang peran ABRI dalam bidang sosial politik hal ini berkaitan dengan dengan dwifungsi ABRI. Dijelaskan bahwa peran ABRI dalam bidang sosial dan politik tidak terlepas dari sejarah terbentuknya ABRI Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia melalui sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk (BKR) Badan Keamanan Rakyat sebagai wadah perjuangan yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Setelah itu terjadi perubahan-perubahan dalam menentukan nama kelembagaan. Pada akhirnya melalui Penetapan Presiden RI tanggal 3 Juni 1947 mengesahkan TNI sebagai wadah kelembagaan militer Indonesia dan membubarkan segala bentuk organisasi bersenjata untuk segera meleburkan diri dalam kelembagaan TNI. Masa demokrasi liberal adalah masa dimana TNI menghadapi dua ancaman, yaitu dari Belanda yang masih berhasrat menguasai kembali Indonesia dengan langkah-

langkah diplomasi yang merugikan Indonesia dan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Pada masa ini juga Angkatan Perang Republik Indonesia khususnya Angkatan Darat juga mengalami permasalahan Intern, yang menimbulkan perpecahan diantara para perwiranya. Sedangkan masa demokrasi terpimpin modernisasi Angkatan Perang dilakukan dengan membeli persenjataan dari luar negeri dan melakukan pembinaan melalui pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dalam perang. Pada akhirnya peristiwa G30SPKI 1965 berdampak pada berakhirnya kekuasaan Orde Lama akibat dari tuntutan-tuntutan rakyat yang tidak terpenuhi. Orde Baru lahir sebagai solusi dan memenuhi tuntutan rakyat saat itu, dimana salah satu tuntutan rakyat adalah pembubaran PKI. Orde Baru menjadi titik awal bagi golongan militer memperluas perannya di bidang non-hankam, dwifungsi ABRI menjadi landasan bagi golongan militer untuk ikut serta menentukan jalannya pemerintahan. Dalam perkembangan dwifungsi ABRI mengalami perubahan, yang awalnya peran sosial politik dilakukan pada kondisi Indonesia mengalami kelumpuhan dalam berbagai bidang dalam menghadapi revolusi fisik, dwifungsi ABRI di masa Orde Baru memberi peluang penuh bagi golongan militer diberbagai bidang dengan tujuan pembangunan nasional.

Kelebihan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang luas tentang sejarah perkembangan ABRI, menyorot perkembangan peran sosial politik golongan militer dari masa-kemasa dan urain peran ABRI di berbagai bidang. Pemaparan mengenai perubahan-perubahan struktur organisasi dalam kelembagaan militer, rekontruksi penulisan yang mudah dipahami merupakan kelebihan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini intinya adalah ruang lingkup kajian temporal yang khusus namun cakupan pembahasan peran sosial politik yang sangat luas, sehingga penulis merasa perlu untuk membahas peran sosial politik secara khusus melalui sudut pandang tokoh-tokoh pendiri militer Indonesia.

Kamil (2009:2-7)dengan judul *Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998*, menjelaskan militer dan kekuatan militer di Indonesia. Secara garis besar memaparkan bahwa

lemahnya institusi negara yang di kelolah oleh para politisi sipil menjadikan militer ikut serta dalam mengatur persoalan politik. Pemerintahan dibawah kendali elit sipil dengan sistem demokrasi parlementer menganut sistem multipartai, membuat terjadi banyak perpecahan akibat sikap para politisi partai politik mengedepankan kepentingan individu dan kepentingan masing-masing partai politiknya.

Posisi militer dalam suatu negara yakni sebagai pelindung dari ancaman dan gangguan luar, hal itu merupakan kewajiban pokok dari sebuah institusi militer di suatu negara. Pembentukan organisasi militer di Indonesia ditempuh dengan jalan yang cukup panjang, setelah banyak berganti nama, nama TNI menjadi wadah nasionalisme bagi para pejuang. Peran militer dalam bidang politik di Indoneisa bukan tanpa alasan, TNI merasa memiliki tanggung jawab dalam menentukan nasib bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Peran politik yang diperoleh militer adalah hasil jerih payah mereka dalam melewati berbagai peristiwa yang terekam dalam searah bangsa Indonesia, hal ini menandakan bahwa militer adalah unsur yang mutlak dalam suatu negara. Kelebihan dari penelitian ini adalah memaparkan secara sistematis keterlibatan ABRI/TNI dalam bidang politik. Pemaparan keterlibatan militer terhadap dunia politik dimulai sejak lahirnya dan berdirinya militer Indonesia dan puncaknya sampai pada pemerintahan Orde Baru. Namun dalam penelitian ini belum banyak disinggung mengenai landasan-landasan yang memperkuat kedudukan militer dalam kancah politik.

Rusli (1989) dalam bukunya yang berjudul *Peran ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979)* menjelaskan tentang baik dan buruknya peranan ABRI untuk ikut terjun dalam bidang politik. Dari baik dan buruknya ABRI berperan dalam bidang politik, terdapat dampak serta pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Elit sipil yang bergelut dalam perpolitikan, menganggap bahwa militer adalah ancaman bagi mereka. Hingga yang tercermin adalah persaingan untuk saling menjatuhkan, bukan berjalan beriringan bekerjasama untuk mencapai tujuan nasional. Kegemilangan militer sudah terlihat pada masa-masa revolusi, dimana ketika para pemimpin gagal dalam berdiplomasi. Dominasi militer semakin kian tampak pada masa Orde Baru

pada akhir 1960-an. Dengan apa yang disebut dengan dwifungsi ABRI, membawa ABRI dalam perpolitikan Indonesia, hal ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat pada saat itu yang mengalami krisis kepercayaan kepada para pemimpin elit sipil. Dalam periode waktu pada buku ini yakni tahun 1965-1979, jelas bahwa dalam buku ini lebih banyak mengkaji peran ABRI dan implementasi dwifungsinya pada masa Orde Baru. Tentang lahirnya konsep dwifungsi ABRI yang tumbuh dari pemikiran A.H. Nasution tidak dipaparkan secara menyeluruh. Akan tetapi buku ini dapat menjadi sumber yang membantu penulis mengkaji penelitian yang hendak ditulis.

Fattah (2005: 138-144) dalam bukunya yang berjudul *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004* menjelaskan tentang keterlibatan tentara/TNI dalam perpolitikan sebenarnya telah terjadi sejak Indonesia meraih kemerdekaan. Keikutsertaan tentara merupakan panggilan hati, berjuang mempertahankan kemerdekaan melawan sisa-sisa penjajahan. Tak pelak kondisi masa-masa Agresi Militer Belanda mengharuskan bangsa Indonesia mengerahkan seluruh potensi nasional yang dapat membantu mengatasi kelumpuhan disegala bidang. Tentara di masa-masa itu, banyak bertindak membantu melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dalam kondisi perang. Dari hal tersebut tentara merasa berkewajiban untuk berperan aktif membantu pemerintahan menangani permasalahan-permasalahan yang ada, dalam arti baik dibidang non-hankam. Dijelaskan bahwa keadaan darurat pada saat itu memberikan legitimasi TNI untuk melakukan peran di luar hankam. Dalam perkembangannya lahir dwifungsi ABRI yang merupakan suatu doktrin yang pernah tertanam dalam diri tentara Indonesia. Tentara menjadi golongan fungsional yang pada demokrasi terpimpin menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh besar. Kendali dari presiden Soekarno, membuat keterlibatan tentara tidak begitu mendominasi seperti masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Suharto. Tentara dengan dwifungsi ABRI-nya, semakin pesat mendominasi hingga kurang memberi ruang pada partai politik maupun organisasi-organisasi masa. Pada masa ini demokrasi tidak berkembang dan tentara semakin tenggelam dalam urusan perpolitikan maupun bidang lainnya, membuat peningkatan

profesionalisme tentara sebagai kekuatan hankam tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan dengan semestinya.

Hingga pada akhirnya reformasi menuntut tentara berubah, TNI dengan reformasi internalnya meninggalkan doktrin dwifungsi, dan tidak melibatkan diri dalam urusan politik dan bersifat netral. TNI dimasa reformasi fokus meningkatkan profesionalisme dalam bidang pertahanan keamanan, dalam hal ini diharapkan peran pemerintah mampu memberikan fasilitas penunjang kebutuhan TNI dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia. Buku ini menjadi sumber yang sangat membantu penulis, selain memberikan pemahaman-pemahaman keterlibatan TNI/ABRI dalam perpolitikan masa kemerdekaan sampai demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin, buku ini juga memaparkan konsep dan praktik dwifungsi. Periode waktu pengkajian dalam buku ini yakni tahun 1945-2004 membahas secara luas dan cukup lengkap, baik mengenai dwifungsi ABRI itu sendiri maupun mengenai konseptor dwifungsi ABRI yakni A.H. Nasution.

Soebijono, dkk (1992) dalam bukunya yang berjudul *“Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia”* menjelaskan bahwa dalam memahami dwifungsi ABRI, haruslah ada pemahaman mengenai profesionalisme militer. Hal ini dianggap penting karena untuk itu haruslah kita dapat memahami profesionalisme ABRI untuk mengerti dwifungsi ABRI. Dipaparkan ada dua macam pengertian profesionalisme militer, yaitu yang pertama adalah profesionalisme konvensional, militer profesional harus fokus dalam bidang pertahanan dan keamanan, guna mencegah ancaman dari luar maupun dalam. Militer juga tidak diperbolehkan mengurus non-hankam, karena hal tersebut akan mengganggu urusan dalam bidang hankam. Kemudian yang kedua adalah konsep profesionalisme baru, yakni pendayagunaan seluruh potensi nasional dalam arti mengerahkan seluruh kemampuan dari semua lapisan untuk ikut serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh negara, baik itu aspek sosial, ekonomi, dan politik. Konsep profesionalisme baru yang terkandung dalam Hankamrata, yang dikembangkan oleh A.H. Nasution. Dwifungsi ABRI sendiri menyangkut bidang sosial, ekonomi, dan politik, yang membuat terjadinya

intensifitas interaksi antara kelompok ABRI dan elit sipil. Buku ini hanya memaparkan tentang perkembangan dwifungsi ABRI bukan menyangkut penilaian, pelaksanaan atau implementasi dari konsep tersebut. Buku ini dapat menjadi sumber yang dapat membantu penulis memahami dwifungsi itu sendiri yang digagas oleh A.H. Nasution.

Sundhaussen (1986, ix:xiv) dalam buku yang berjudul “*Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*” menjelaskan tentang peran politik golongan militer dan menggambarkan hubungan sipil dan militer pada negara-negara berkembang secara umum. Di Indonesia campur tangan golongan militer dalam bidang politik merupakan akibat dari intervensi golongan sipil terhadap internal militer khususnya Angkatan Darat. Lemahnya elit sipil dalam pimpinan politik karena perpecahan antar golongan yang berkepentingan mengakibatkan kondisi pemerintahan Indonesia terancam dari serangan-serangan pihak luar maupun dalam. Kegagalan eliti sipil tersebut membuat golongan militer mengambil langkah untuk terlibat dalam kepemimpinan politik Indonesia dalam rangka mengamankan jalannya pemerintahan. Keterlibatan golongan militer dalam perpolitikan menuai anggapan bahwa hal tersebut karena adanya kepentingan individu maupun golongan. Anggapan tersebut kurang tepat karena pada saat itu semua golongan elit termasuk golongan militer berusaha mencari sebuah konsep sistem pemerintah yang sesuai jati diri bangsa Indonesia. Demokrasi parlementer yang merupakan sebuah sistem peninggalan Barat, membawa Indonesia dalam kemerosotan dan perpecahan. Demokrasi terpimpin lahir sebagai sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan perpecahan, dengan dibawah kendali satu komado demokrasi terpimpin menjadi sebuah harapan agar perpecahan yang terjadi dapat dipersatukan kembali. Sistem demokrasi terpimpin dalam implementasinya juga terjadi penyimpangan-penyimpangan, membuat golongan militer tidak puas. Hingga menjelang 1967 sebuah rezim militer lahir menggantikan pemerintahan sipil.

Buku ini banyak mengambil sumber-sumber dari golongan militer baik berupa buku, artikel, dokumen-dokumen maupun wawancara. Dalam mengumpulkan informasi terkait peran militer Indonesia dalam persoalan politik,

dilakukan penelitian lapangan selama dua tahun (1967-1969) sebagai peninjau dalam Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Indonesia dan beberapa kunjungan singkat lainnya. Fokus kajian dalam buku ini adalah mendalami tindakan-tindakan dan pemikiran golongan militer dalam peristiwa terkait permasalahan politik di Indonesia. A.H. Nasution merupakan salah satu tokoh yang banyak dibahas dalam penelitian ini terkait karir dan pemikiran dalam persoalan militer maupun politiknya. Kajian dalam buku ini menjadi salah satu sumber bagi penulis untuk mengkaji penelitian tentang pemikiran A.H. Nasution tentang dwifungsi ABRI.

Dari beberapa review penelitian terdahulu baik skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, telah memberikan banyak pemahanan kepada penulis walaupun yang menjadi fokus dari penelitian-penelitian tersebut berbeda. Dalam beberapa penelitian penulis juga menemukan beberapa pembahasan yang masih belum disinggung terkait pemikiran dari A.H. Nasution. Dari penelitian terdahulu penulis dapat mengambil celah dari sekian banyak penelitian tentang peran A.H. Nasution dari berbagai aspek, begitu pula dengan peran ABRI dari masa ke masa. Penulis mencoba mengembangkan penelitian dari pembahasan penelitian-penelitian terdahulu yang belum secara menyeluruh dikaji maka dari itu penulis mengambil judul dengan tema sejarah pemikiran, untuk menambah daftar penelitian mengenai A.H. Nasution dengan konsep yang digagasnya.

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran disusun oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas atas permasalahan-permasalahan yang hendak dikaji. Permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan untuk dikaji adalah apa yang melatar belakangi munculnya pemikiran A. H. Nasution tentang konsep dwifungsi, konsep dwifungsi ABRI menurut pandangan A. H. Nasution, dan upaya A.H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi ABRI. Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan informasi dan mengedukasi dengan menguraikan konsep dwifungsi ABRI yang digagas oleh A. H. Nasution. Impementasi yang mengalami penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru membuat publik mempunyai penilaian negatif terhadap dwifungsi ABRI maupun A.H. Nasution yang mencetuskan gagasan awal dwifungsi ABRI.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas peneliti perlu menggunakan teori dan pendekatan sebagai alat bantu untuk mengkaji penelitian ini. Dalam mengkaji penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan dan teori hermeneutika. Tugas dari sosiologi pengetahuan adalah untuk membongkar berbagai hal dibalik sistem pengetahuan setiap individu. Sosiologi pengetahuan menekuni apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam suatu masyarakat, terlepas dari benar atau tidaknya pengetahuan tersebut. Kemudian dalam proses yang sedemikian rupa pengetahuan itu dikembangkan, dialihkan, dipelihara sampai akhirnya membentuk sebuah kenyataan yang sebenarnya dan dapat diterima oleh orang awam (Berger dan Luckman, 1990:4).

Sosiologi pengetahuan yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana penulis dalam memahami suatu pemikiran dengan konteks sosial-kultural dari pemikir tersebut. Bahwasanya dalam suatu struktur pikiran khususnya dan struktur kesadaran pada umumnya penting dipahami dalam hubungan latar belakang sosio-kultural masyarakat dimana pemikir itu hidup (Kartodirdjo, 1993:180). Pendekatan sosiologi pengetahuan dalam penelitian ini menjadi sudut pandang peneliti dalam memahami kondisi sosial kultur yang mempengaruhi pemikiran A. H. Nasution.

Sedangkan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini penulis menggunakan teori Hermeneutika. Pengertian Hermeneutika erat hubungannya dengan penafsiran teks-teks dari masa lalu dan penjelasan pelaku sejarah. Sejarawan mencoba menjelaskan masa lalu dengan menempatkan dirinya dalam alam pemikiran pelaku sejarah. Hermeneutika mencoba memasuki diri pelaku dan berupaya memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diperbuat pelaku sejarah. Ada semacam dialog batin antara batin sejarawan yang menggunakan pengalaman hidupnya sendiri dan sumber-sumber sejarah yang digunakan (Madjid dan Wahyudi, 2010:249-250).

Menurut Jurgen Habermas menerangkan dalam hermeneutika, bahasa (linguistik), tindakan dan pengalaman tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Bahasa dan pengalaman masuk dalam struktur dialektika dengan tindakan. Dalam bukunya berjudul *The Theory of Communicative Action*, Habermas membagi

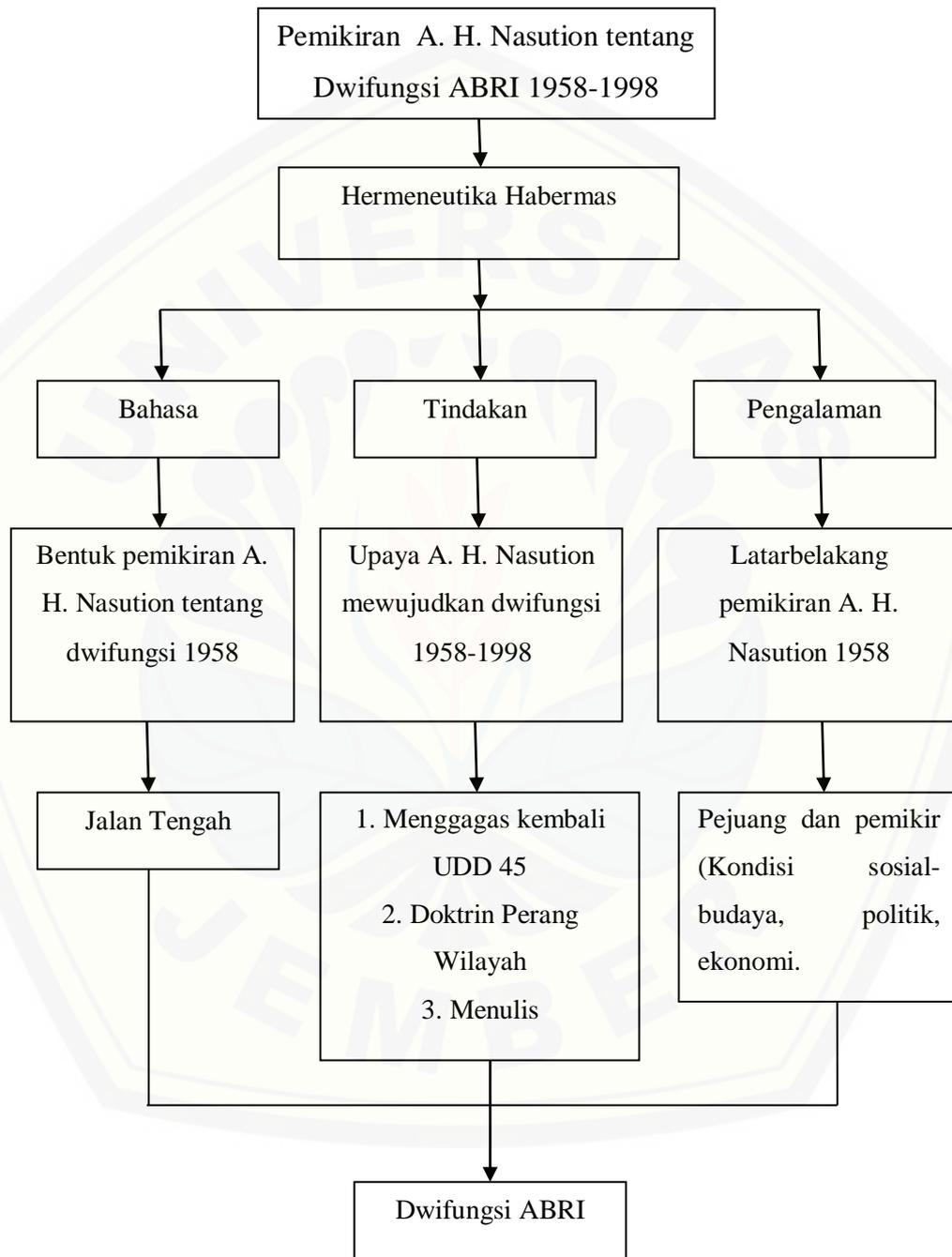
tindakan menjadi empat macam yaitu tindakan teleologis, normatif, dramaturgik, dan komunikatif (Sumaryono, 1999:94-95).

Bahasa merupakan unsur yang fundamental dalam hermeneutika. Menurut Habermas kita tidak dapat menerangkan hal-hal yang tidak yang tidak mungkin kita pahami, bahkan kita juga tidak dapat membuat interpretasi atas hal-hal tersebut. Pemahaman hermeneutika berbeda dengan jenis pemahaman lainnya, sebab hermeneutik diarahkan pada konteks tradisional tentang makna.

Bagi Habermas (Sumaryono, 1999: 93) interpretasi tergantung pada hubungan timbal balik antara pemahaman atas bagian-bagian yang merupakan keseluruhan yang terdiri dari campuran macam-macam hal yang telah diketahui sebelumnya dan koreksi terhadap apa saja yang di kemudian hari dirasakan tidak sesuai lagi. Pemahaman dan interpretasi dapat menimbulkan lingkaran hermeneutik. Proses pemahaman sebenarnya merupakan interpretasi itu sendiri. Interpretasi menurut Habermas tidak bisa lepas dari tiga kelas ekspresi yang dikutipnya dari Dilthey, yakni bahasa (linguistik), tindakan dan pengalaman. Bahasa dan pengalaman dalam logika Habermas, harus masuk ke dalam dialektik dengan tindakan. Oleh karena itu, bila hendak melakukan interpretasi yang benar dan tepat, kita harus mengupayakan dialog antara bahasa dan pengalaman di satu sisi dengan tindakan di sisi lainnya. Dari paparan di atas dapat digambarkan suatu bagan guna mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

2.1 Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian sejarah, tepatnya sejarah pemikiran. Sehingga dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode sejarah. Penulis pada tahap ini mencoba menganalisis secara kritis dari beberapa sumber-sumber dan data-data terkait permasalahan yang hendak dikaji untuk direkonstruksi dalam rangka menemukan gambaran yang jelas mengenai peristiwa pada masa lampau. Dalam penelitian ini permasalahan-permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai pemikiran A.H. Nasution tentang dwifungsi ABRI. Metode penelitian sejarah digunakan sebagai prosedur penelitian, adapun prosedur tersebut terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik, interpretasi, dan historiografi (penulisan) (Gottschalk, 2015:32).

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan, langkah awal yang dilakukan oleh penulis yaitu mencari sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian, terkait dengan pemikiran A.H. Nasution mengenai dwifungsi ABRI. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku-buku, skripsi, jurnal, tesis, dokumen, maupun video sebagai penunjang penelitian yang akan diteliti. Kemudian setelah sumber-sumber tersebut terkumpul, penulis harus membedakan sumber tersebut menjadi dua kategori yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Langkah pertama, penulis melakukan pengumpulan sumber. Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis dalam menulsi sumber-sumber yang dibutuhkan, sebagian besar sumber-sumber primer tersebut diperoleh dari karya-karya A. H.Nasution sendiri seperti Memenuhi Panggilan Tugas. Memenuhi Panggilan Tugas adalah buku memoar yang ditulis sendiri oleh A. H. Nasution sebanyak 9 jilid. Jilid 1 dengan tema kenangan masa muda, jilid 2; kenangan masa gerilya, jilid 3; masa pancaroba pertama, jilid 4; masa pancaroba kedua, jilid 5; kenangan masa orde lama, jilid 6; masa kebangkitan orde baru, jilid 7; masa konsolidasi orde baru, jilid 8; masa pemancangan orde pembangunan, jilid 9; bagi pejuang tiada tugas akhir dan tiada akhir tugas. Penulis dapatkan buku tersebut dari koleksi perpustakaan Universitas Jember. Pada buku Memenuhi Panggilan Tugas

jilid 1 dengan tema kenangan masa muda, banyak menggambarkan kehidupan A. H. Nasution ketika masa kanak-kanak hingga remaja. Jilid 2 Memenuhi Panggilan Tugas dengan tema kenangan masa gerilya, banyak menggambarkan kondisi saat Indonesia menghadapi Agresi militer Belanda I dan II. Jilid 3 Memenuhi Panggilan tugas dengan tema masa pancaroba pertama banyak mengupas kondisi perpolitikan masa Orde Lama. Jilid 4 Memenuhi Panggilan Tugas dengan Tema masa pancaroba kedua banyak membahas kondisi perpolitik Indonesia pasca dekrit presiden. Empat buku ini menjadi sumber utama bagi penulis untuk mengkaji pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI. Banyak Lagi karya A. H. Nasution yang secara langsung membahas tentang dwifungsi ABRI yang memungkinkan penulis memahami betul pemikiran A. H. Nasution tentang konsepsinya, namun buku-buku tersebut sulit di peroleh dan tergolong langka. Penulis memaksimalkan sumber-sumber yang ada yang tentu masih sangat relevan di jadikan sumber primer dalam mengkaji penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber data sekunder yang digunakan penulis untuk memahami kronologi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi secara kronologis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat argumen-argumen pada sumber primer yang diperoleh penulis, beberapa sumber tersebut yaitu karya Prof. Salim Said dengan bukunya yang berjudul “Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik militer Indonesia 1958-2000”. Berisi tentang awal kemunculan dwifungsi yang dipengaruhi oleh kelahiran militer Indonesia sendiri yang unik, hingga dikonsepsikan oleh A. H. Nasution yang pada saat itu menjadi penting militer. Serta tumbangnya dwifungsi seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru. Dalam buku ini memaparkan latar belakang sejarah, peristiwa penting yang berpengaruh, cara pandang dan pemikiran yang berkembang dikalangan perwira militer Indonesia sejak tahun 1958 hingga 2000.

Kajian sumber sekunder selanjutnya dalam penelitian skripsi ini untuk mendapatkan kronologi yang jelas dari sosok A.H. Nasution. Tulisan Ulf Sundhaussen yang berjudul “Politik Militer 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI 1945-1967” dimana judul aslinya adalah “Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967” diterjemahkan oleh Hasan Basari yang dicetak pada tahun

1986. Buku ini berisi tentang masalah perkembangan hubungan sipil dan militer yang semakin memburuk sejak 1945, ketika pertama kali terjadi perselisihan antara pemimpin sipil dan militer, hingga 1967 pada waktu Presiden Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto. Buku ini mengambil perspektif kaum dari golongan sipil dan diimbangi oleh pandangan para pengkritik pemerintah sipil khususnya para pimpinan militer .

Kemudian ada beberapa buku lainnya seperti Buku “Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia” karya Soebijono dkk, buku “Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004” karya Abdoel Fattah, buku "Peran ABRI Dalam Politik", karya Muhammad Rusli Karim, buku "Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia", dan buku “Bila ABRI Menghendaki” karya Indria Samego. Buku-buku ini penulis gunakan untuk memperkuat dan membanding dari sumber-sumber primer yang penulis kumpulkan. Dari sumber primer maupun sumber sekunder penulis banyak memperolehnya dari perpustakaan Universitas Jember dan koleksi pribadi dari penulis.

Langkah kedua, penulis melakukan porses kritik sumber. Setelah sumber-sumber terkumpul penulis melakukan kritik penulis melakukan kritik ekstern terhadap sumber-sumber primer. Penulis menggunakan kritik ekstern dengan cara mengidentifikasi isi dari sumber tersebut dan mengecek secara fisik dari bahan kertas yang digunakan, latar belakang penulis buku juga tahun terbit sumber tersebut, sehingga dapat terlihat jelas keaslian sumber dari dilakukannya kritik ekstern oleh penulis. Penulis juga melakukan kritik intern dalam mengkaji sumber penelitian ini dengan cara menilai kebenaran apa yang benar-benar terjadinya hubungan isi sumber satu dengan isi sumber-sumber lainnya yang benar-benar sudah relevan dan mendukung penelitian ini, sehingga dapat dilihat kebenaran isinya untuk menjadi fakta sejarah yang akan dikaji oleh penulis (Gottchalk, 1985:94).

Langkah ketiga penulis melakukan interpretasi. Pada tahap ini penulis mencoba menguraikan fakta-fakta (analisis) maupun informasi yang diperoleh dari sumber satu kesumber lainnya, kemudian menghubungkan, mengaitkan dan

menyatukan (sintesis) fakta-fakta sejarah tersebut untuk membentuk kerangka peristiwa yang kronologis dan sistematis (Abdurahman, 2007:73). Dalam melakukan tahap ini penulis mencoba seobjektif mungkin dan berusaha menghindari subjektifitas sehingga isi dari penelitian yang dikaji mendekati kebenaran. Setelah itu ditafsirkan dan dirangkai secara kronologis menjadi suatu fakta sejarah yang saling berhubungan sesuai dengan realitas yang ada. Analisis permasalahan pada penelitian ini menggunakan pendekatan dan teori, dalam hal ini menyoroti tentang “Pemikiran A. H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998”.

Langkah keempat penulis melakukan Historiografi. Pada tahap ini penulis melakukan rekonstruksi rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1969:32). Serangkaian dari data dan fakta-fakta yang diperoleh penulis mencoba menyusunnya secara sistematis melalui heuristik (pengumpulan sumber), kritik, dan interpretasi (analisis dan sintesis) sehingga menghasilkan suatu karya tulis yang kronologis. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis mencoba memaparkan seobjektif mungkin dalam penulisan dan penyusunan penelitian tentang “Pemikiran A.H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998”.

Rancangan sistematika skripsi merupakan bentuk penyajian penelitian ini yang berjudul “Pemikiran A.H. Nasution Tentang Konsep Dwifungsi ABRI tahun 1945-1998” dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Pada bab 1 pendahuluan dijelaskan latar belakang alasan penulis mengkaji permasalahan mengenai pemikiran A.H. Nasution tentang dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998.

Pada bab1 pendahuluan selain berisikan latar belakang juga terdapat penegasan pengertian judul, ruang lingkup, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 berisikan tentang tinjauan pustaka yakni riview terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul yang hendak penulis teliti. Dalam tinjauan pustaka juga memaparkan teori dan pendekatan yang hendak digunakan dalam penelitian ini. Kemudian kerangka pemikiran konseptual atau teori, metode penelitian dan yang terakhir rancangan

sistematika skripsi. Sedangkan bab 3 berisikan tentang metodologi penelitian sejarah yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (penulisan).

Pada bab 4, 5, 6 merupakan penjelasan hasil dari penelitian. Pada bab 4 penulis memaparkan hasil penelitian tentang permasalahan apa saja yang mempengaruhi munculnya pemikiran A.H. Nasution tentang konsep dwifungsi ABRI tahun 1945-1998. Pada bab ini berisikan tiga pokok sub bab yakni yang pertama kondisi sosial-budaya, kedua adalah kondisi politik, dan yang ketiga kondisi ekonomi. Kondisi sosial-budaya adalah kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi pemikiran seorang tokoh dimana tokoh tersebut lahir dan tumbuh pada kondisi lingkungan tertentu begitu juga dengan kondisi politik pada masa itu, dan kondisi ekonomi. Dengan mengkaji kondisi apa saja yang mempengaruhi aktor tersebut, penulis dapat memahami pemikiran A.H. Nasution dalam mengagas dwifungsi ABRI. Bab 5 penulis memaparkan hasil penelitian tentang permasalahan pokok pada judul ini, yakni dwifungsi ABRI menurut A. H. Nasution. Pada bab ini akan diuraikan mengenai Perang Rakyat Semesta, Jalan tengah A. H. Nasution, dan landasan dwifungsi ABRI. Dan yang terakhir dari pembahasan yakni bab 6, memaparkan hasil penelitian tentang permasalahan upaya A.H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi ABRI. Pada bab ini akan diuraikan upaya A.H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi ABRI baik itu dari pemerintahan maupun dalam tubuh militer itu sendiri. Sebagai penutup dalam pembahasan di simpulkan pada bab 7.

BAB 5. BENTUK PEMIKIRAN A. H. NASUTION TENTANG DWIFUNGSI ABRI TAHUN 1958

Pada bab V ini akan diberikan pemaparan mengenai hasil penelitian pembahasan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada, mengenai bentuk pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI. Uraian yang paparkan merupakan penjabaran dari rumusan masalah yang ada. Adapun yang yang hendak dipaparkan oleh penulis yakni konsep jalan tengah A. H. Nasution dan landasan dwifungsi ABRI.

Setiap konsepsi mengandung cita-cita dan harapan yang hendak dicapai dimasa mendatang. Lahirnya sebuah konsepsi akan dibarengi dengan sebuah aksi-aksi. Menjelaskan tentang bentuk pemikiran A.H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958 tidak terlepas dari konsep “Jalan Tengah” yang merupakan embrio dari dwifungsi. Bagaimana embrio ini menjelma sebagai dwifungsi dan apa saja yang menjadi landasan dwifungsi berikut dipaparkan pada dua subbab di bahwa ini

5.1 Konsep Jalan Tengah A. H. Nasution

Menurut Salim Said (2001:12) menyebutkan bahwa kelahiran dwifungsi ABRI lahir pada periode Tahun 1957-1959 terutama dengan ditandainya pidato “Jalan tengah”. Pidato yang diucapkna Nasution pada Dies Natalis pertama Akademi Militer Nasional (AMN) tersebut, hanya mungkin dimegerti dengan baik jika diletakan dalam konteks perkembangan politik masa tersebut. Jalan Tengah adalah sebuah konsep mengenai sikap dan posisi tentara Indonesia dalam pemerintahan.

Esensi pidato di AMN Magelang tersebut adalah penjelasan A.H. Nasution mengenai posisi tentara dalam masyarakat. A. H. Nasution mengatakan bahwa yang paling baik untuk posisi TNI dalam perkembangan negara pada saat itu adalah menempuh Jalan Tengah seperti yang sekarang ini telah mulai dilaksanakan sebagai garis kebijakan, baik oleh panglima tertinggi, pemerintahan, maupun pimpinan angkatan perang, yaitu membuka kesempatan yang luas bagi tokoh-tokoh militer sebagai perseorangan, untuk turut serta secara aktif

menyumbangkan tenaganya diluar bidang militer, yaitu turut menentukan kebijakan negara pada tingkat-tingkat yang tertinggi seperti pada bidang-bidang finansil-ekonomi (Said, 2001:20). Perkembangan negara yang pada saat itu belum stabil, memberikan kesempatan kepada tentara berpartisipasi dalam menentukan kebijakan ditingkat pusat dengan tujuan menjaga kestabilan disektor ekonomi berdasarkan Jalan Tengah.

Jalan Tengah bagi A. H. Nasution adalah pilihan lebih baik daripada pengaruh-pengaruh dari luar negeri kepada Indonesia dalam masa Perang Dingin, dikatakan bahwa oknum berusaha mempengaruhi pemimpin-pemimpin militer agar bisa digolongkan pada kepentingan-kepentingan terhadap blok Barat maupun blok Timur. Di dalam negeri sendiri adajuga golongan-golongan elitpolitik berusaha mempengaruhi pemimpin-pemimpin militer, agar bisa dibawa kepada kepentingan politiknya (Said, 2001:21). Tampak di sini petinggi militer menjaga agar militer tetap pada otonominya, tidak ingin ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan elit politik untuk kepentingan golongan.

Pada pidatonya A. H. Nasution menjelaskan apa persisnya Jalan tengah itu. Jalan Tengah adalah memberikan cukup saluran pada tentara bukan sebagai organisasi, tapi sebagai perseorangan-perseorangan yang menjadi exponen (wakil) dari organisasi militer, untuk turut serta menentukan kebijakan negara pada tingkat-tingkat yang tinggi (Said, 2001:21). Dapat dipahami bahwa yang dituntut A. H. Nasution adalah bukan keterlibatan tentara secara organisasi, akan tetapi lebih kepada keterlibatan secara perseorangan. Jelas keterlibatan ketataran perseorangan ke organisasi pada masa Orde Baru telah menyimpang dari embrionya yakni Jalan Tengah.

Jalan tengah yang dikonsepsikan A. H. Nasution pada dasarnya adalah batas-batas bagi tentara dalam mengambil perannya berbangsa dan bernegara. Jalan Tengah adalah sikap tentara dalam berbangsa dan bernegara pada masa itu, A. H. Nasution menjelaskan bahwa tentara Indonesia tidak mencontoh keadaan-keadaan seperti beberapa negara di Amerika Selatan, dimana tentara sebagai alat permainan, bahkan menjadi pemain politik, dan tidak seperti di Eropa Barat dimana tentara merupakan alat yang mati (Said, 2001:22). A. H. Nasution

menyadari betul bahwa kelahiran tentara Indonesia berbeda dengan negara-negara lain, secara tidak langsung konsep ini menjadi batasan bagi militer untuk tidak mendominasi politik melihat latar belakang perjuangan sejarah tentara bersama rakyat sendiri pada masa revolusi kemerdekaan. Namun konsep ini juga tidak membiarkan tentara di luar ring pemerintahan, karena tentara merasa berhak ikut campur dalam pemerintahan menentukan nasib negara.

Sebelum batasan ini di terjang oleh pemerintah Orde Baru, sebenarnya konsepsi Jalan Tengah A. H. Nasution ini telah diterjang lebih dulu oleh pemerintah Orde Lama dengan gagasan Kekaryaannya Soekarno. Melalui Pengakuan Dewan Nasional kepada TNI sebagai salah satu golongan karya (golongan fungsional) hanya beberapa hari setelah pidato Jalan Tengah (Said, 2001:22). Sikap A. H. Nasution dalam hal ini membiarkan perubahan keterlibatan militer dari tingkat perseorangan ketingkat organisasi. Ada dua kemungkinan yang mendasari sikap A. H. Nasution tersebut yakni, pertama tidak punya wewenang A. H. Nasution dalam memberikan peran tersebut kepada tentara, dan yang kedua A. H. Nasution memiliki kepentingan atau ambisi-ambisi dari wewenang diberikan oleh pemerintah.

Yang tidak banyak diketahui banyak orang adalah, hingga pidato “Jalan Tengah” di sampaikan, yang memiliki wewenang dalam memberikan peran politik kepada tentara secara legal sebenarnya adalah Presiden Soekarno. Legitimasi peran politik militer itu didasarkan Presiden Soekarno pada konsep kekaryaannya yang dikembangkannya sebagai alternatif untuk memperkecil partai politik. Dalam proses politik menjelang dan setelah kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, A. H. Nasution perlahan-lahan terkooptasi oleh Presiden Soekarno, yang telah menggunakan tentara melawan partai politik. Dengan dukungannya militer, Presiden Soekarno berhasil menyingkirkan partai-partai dan sebagai gantinya tentara menjadi kekuatan politik legal sebagai bagian dari Golongan Karya (Tempo, 2010). Dapat digaris bawahi bahwa militer dapat menjadi kekuatan politik legal adalah karena Presiden Soekarno memberi peran sosial-politik kepada militer untuk mencapai tujuan politiknya, militer telah terjun kekancah politik jauh sebelum pidato “Jalan Tengah” A. H. Nasution.

Sadar akan pentingnya peran politik tentara yang legal di bawah konstitusi baru, Presiden Soekarno tidak ingin Nasution menjadi pesaingnya dalam menguasai tentara. Dengan menggunakan posisi sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang (Pangti), Soekarno berangsur-angsur menjadikan dirinya sebagai pemimpin tentara, Pada Juni 1962, Presiden Soekarno sudah cukup kuat untuk menyingkirkan A. H. Nasution dari kedudukan pimpinan Angkatan Darat. Selanjutnya, sampai pensiun sebagai Jenderal bintang empat, A. H. Nasution tidak pernah lagi diberi kesempatan memegang komando (Tempo, 2010).

Sikap A. H. Nasution yang lunak pada masa Orde Lama ini pada akhirnya tidak berlaku pada masa Orde Baru. Mantan panglima Kostrad Soeharto berkuasa pada akhir Orde Lama, ketika peran politik tentara sudah sangat menonjol. Ini akibat dinamika politik yang menyisakan hanya tiga kekuatan yang berhadapan yakni Soekarno, TNI dan Partai Komunis Indonesia. Ketika PKI kemudian dihancurkan oleh tentara, Presiden Soekarno berangsur kehilangan peran, maka tampillah tentara, selama 32 tahun, sebagai kekuatan dominan di atas pentas politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, A. H. Nasution tampil sebagai pengkritik dwifungsi. Yang tampaknya tidak disadari oleh A. H. Nasution adalah jauh sebelum Soeharto berkuasa, Presiden Soekarno telah mengambil alih kepemimpinan politik militer dan manipulasinya untuk kepentingan politik Soekarno. Bentuk yang sudah dimanipulasi itulah yang diwarisi, ditafsirkan kembali, dan dimanfaatkan oleh Soeharto untuk kepentingan dan kelanggengan kekuasaannya (Tempo, 2010).

Istilah nama dwifungsi sendiri menurut penuturan Jenderal A. H. Nasution diucapkan secara tidak sengaja dan spontan dalam suatu ceramah pada rapat pimpinan Kepolisian di kota Porong pada masa awal Demokrasi Terpimpin. Dwifungsi berarti dua fungsi bagi militer Indonesia, fungsi pertahanan dan fungsi sosial politik. (Said, 2001:1). Melalui beberapa penjelasan di atas A. H. Nasution menghendaki militer ikut berperan dalam politik, tidak menghindari politik, namun dengan batasan-batasan bagaimana sikap tentara sesuai konsep Jalan Tengah. Kecenderungan tentara Indonesia yang ingin terus mengawal jalannya

pemerintahan pada masa itu adalah karena pengalaman tentara selama revolusi yang turut andil dalam perjuangan.

5.3 Landasan Dwifungsi ABRI

Pada pertengahan tahun 1958 pihak TNI khususnya angkatan darat berhasil mengatasi pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara. Hal tersebut membuat posisi politik angkatan darat semakin kuat, sedangkan posisi politik partai-partai semakin merosot. Pada sistem Demokrasi Parlementer yang berlaku pada saat itu banyak partai-partai yang saling berebutan rezeki dan kekuasaan untuk golongannya masing-masing tanpa memikirkan kepentingan rakyat banyak (Said, 2002:13-14). Sebagai langkah konsolidasi atas kemenangan dan kekuatan TNI yang ada, A.H. Nasution mengadakan rapat para Panglima Daerah Militer se-Indonesia di Jakarta. Pada kesempatan rapat tersebut yang digelar pada bulan Agustus 1958, memutuskan bahwa tidak akan terulangnya lagi sebab pokok dari kekalutan politik yang ada seperti “politik dagang sapi”, TNI bertekad akan memusatkan tenaga kepada penertiban hukum dan disiplin baik itu yang ada di sipil maupun militer.

Gagasan-gagasan yang melandasi peran politik yang diperjuangkan A.H. Nasution adalah pengembangan dari hasil pemikirannya selama non aktif dari militer. Selama periode tahun 1957-1959 (masa Demokrasi Liberal), menurutnya posisi yang baik untuk TNI saat itu ialah membuka kesempatan kepada tokoh-tokoh militer sebagai perseorangan untuk turut menentukan kebijaksanaan negara pada tingkat-tingkat yang tertinggi (Said, 2002:20). Pada masa-masa nonaktif A. H. Nasution banyak melakukan intropeksi diri, bagaimana dia harus bertindak dan bersikap melihat negara mendapat kekacauan dari sistem peninggalan Hindia-Belanda.

Pendapat yang dikemukakan A.H. Nasution juga didukung oleh sikap Soekarno pada pidatonya di Dewan Konstituante. Pidatonya yang digelar di Bandung pada tanggal 22 April 1959 berisi bahwa dalam upaya Pemerintah kepada konstituante untuk kembali kepada UUD 1945, Angkatan Bersenjata sewajarnya yang telah berjasa di masa lalu dan yang akan datang diberikan tempat tertentu dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan sikap Soekarno yang pada

awalnya tidak setuju dengan keberadaan militer di politik terkait peristiwa 17 Oktober 1952, bersumber pada kekecewaannya terhadap partai-partai politik (Said, 2002:14-16). Kekacauan yang terjadi adalah karena tidak ditemukannya mufakat dalam menentukan kebijakan. Partai-partai politik lebih mengedepankan kepentingan golongan dari pada kepentingan bersama, hal ini membawa Indonesia dalam kondisi yang membahayakan. Hasil gagasan A.H. Nasution tentang dwifungsi tidak terlepas dari masa non aktif dirinya sebagai militer semenjak tahun 1952-1955. Selama itu ia memanfaatkan untuk menulis sejumlah buku mengenai masa revolusi, perang kemerdekaan, serta pelajaran yang dapat diperoleh dari masa itu (masa Demokrasi Parlementer) bagi hari depan politik Indonesia serta peran TNI di dalamnya.

Salah satu hasil karyanya terpentingnya ialah buku Pokok-Pokok Gerilya. Di dalamnya berisi uraian mengenai konsep-konsep perang gerilya yang dirancang dan diimplementasikan olehnya pada tahun 1948-1949, serta konsep pertahanan Indonesia masa datang berdasarkan pengalaman tersebut. Konsep-konsep yang ada di dalam buku tersebut kemudian menjadi dasar doktrin pertahanan Indonesia. Diantaranya diwujudkan sebagai Doktri perang wilayah, dalam bentuk komando teritorial (koter).

Pikiran-pikiran yang berdasarkan pengalaman masa revolusi sangat mewarnai pandangan A.H.Nasution ke depan. Menurutnya, Indonesia masih akan terus berjuang sebelum terselesaikannya masalah kemiskinan dan keterbelakangannya. Dalam sistem pertahanan perang gerilya, peranan kepemimpinan militer sangatlah vital dan mutlak. Maka, untuk tujuan perjuangan menuntaskan kemiskinan dan keterbelakangan kepemimpinan sipil harus disuborganisasikan ke bawah pimpinan militer (Said, 2002:24-25). Kenyataan yang terjadi di masa Demokrasi Parlementer, ia kecewa dengan politisi sipil yang dianggap menggagalkan usahanya memodernisasi dan mendepolitisasi TNI. Hal itu juga yang membuat A.H. Nasution berada pada suatu keputusan untuk mengolah pengalaman masa perjuangan gerilya, dan menyimpulkan bahwa tentara Indonesia tidak bisa menghindari politik.

A.H. Nasution juga memandang kembali, menafsirkan, serta menulis mengenai kepemimpinan Panglima Besar Soedirman di masa revolusi. Dalam pandangan A.H. Nasution kepemimpinan Panglima Besar Soedirman adalah kepemimpinan yang menjaga otonomi dan independensi tentara terhadap pengaruh partai-partai yang berkuasa maupun yang beroposisi. Soedirman sendiri merupakan pemimpin tentara yang tidak menghindari politik. Selain ikut rapat dengan pemerintah, Soedirman juga ikut mendiskusikan dengan golongan oposisi. Sosok Soedirman dikenang oleh A.H. Nasution sebagai Panglima Besar yang menolak perintah Presiden Soekarno untuk tetap berada di Yogyakarta saat kota itu hampir jatuh ke tangan tentara kolonial Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Tingkah laku dari Soedirman yang konsisten mempertahankan otonomi tentara terhadap kekuatan-kekuatan politik di luar dirinya menjadi salah satu pembenaran historis peran politik tentara (Said, 2002:26-28). A. H. Nasution juga menuliskan dalam bukunya tentang hubungan tentara dengan politik, pemerintah, dan ideologi. Di dalamnya ia sampaikan bahwa sangatlah keliru apabila pimpinan perang gerilya dan antigerilya lepas dari ideologi. Pihak gerilya khususnya pimpinan gerilya adalah sosok pemimpin dan pelopor ideologi. Ia bergerilya bukan karena pertama perintah pemerintah kepada alat pemerintah, melainkan karena panggilan dari hati sanubari yakni suruhan kesadaran ideologi (politik). Oleh sebab itu, untuk kedepannya menurut A.H. Nasution menganggap tidak boleh adanya pemisah antara gerilya (militer) dengan politik karena itu merupakan pokok yang hakiki bagi seorang gerilya dan antigerilya.

Menurut A.H. Nasution, Panglima Besar Soedirman selalu mengamanatkan bahwa tentara bukan alat mati melainkan alat hidup. Disiplin tentara bukanlah disiplin kadaver, melainkan disiplin yang berjiwa. Panglima Besar Soedirman dikenang oleh A.H. Nasution sebagai seorang Jenderal yang tidak menghindari persoalan politik negara, turut ikut rapat dengan kaum politik, bahkan tidak jaran menjadi juru penengah jika timbul masalah antar pemerintah dengan pihak oposisi (Said, 2001:28-30).

BAB 6. UPAYA A. H. NASUTION MEWUJUDKAN DWIFUNGSI ABRI TAHUN 1958-1998

Pada pemaparan bab 5 mengenai bentuk pemikiran A.H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958 telah memberikan pertanyaan dan membutuhkan jawaban yaitu pada upaya perjuangan A. H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi ABRI tahun 1959-1998. Sepak terjang perjuangan A. H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi ABRI banyak menemui tantangan khususnya karena berbenturan langsung dengan partai terkait kebijakan-kebijakan politik. Upaya A. H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi ABRI dalam hal ini meliputi memprakasai kembalinya UUD 1945 dan doktrin perang wilayah. Pada bab 6 ini akan diberikan pemaparan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penenliti saat melakukan peneliltian mengenai upaya A. H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi ABRI. Penjelasan yang diberikan merupakan penjabaran dari salah rumusan masalah yang ada, berikut adalah uraiannya.

6.1 Masa Periode Orde Lama

Pada tahun-tahun Demokrasi Parlementer (1946-1959) keterlibatan TNI dalam politik relatif terbatas, mengingat kuatnya paham dikalangan masyarakat kuatnya paham dikalangan masyarakat bahwa demokrasi Indonesia harus bersandar pada berfungsinya dan kuatnya peran partai politik. Terlebih lagi karena “suasana internasional” seusai Perang Pasifik dipengaruhi oleh “pertentanganTimur-Barat” bahwa Indonesia hanyalagak diperhitungkan bilanegeri itu menempuh sistem pemerintahan yang berjalan di Amerika Serikat, Inggris,dan Prancis (Said,2001:xix).

Jatuh banggunya kabinet dalam masa Demokrasi Parlementer, krisis dan pemberontakan di daerah pada pertengahan tahun 1950-an, kebuntuan dalam menyusun UUD baru dalam Sidang Konstituante, hasrat menasionalisasi kekayaan ekonomi dari perusahaan-perusahaan asing dan keinginan kuat untukmerebut secara militer Irian Barat kedalam “Pangkuan Ibu Pertiwi”,semua merupakan beban tugas rumit yang mengakibatkan terganggunya

stabilitas pemerintah, yang pada gilirannya menghasilkan gangguan stabilitas politik nasional (Said, 2001:xix).

Didukung Presiden Soekarno yang sudah sejak 1956 berhasrat untuk mengubur partai-partai politik para perwira TNI semakin semangat untuk secepat mungkin menciptakan pemerintahan yang stabil, kuat, dan tegas, guna mengatasi kemacetan di bidang politik dan pembangunan ekonomi. Tenaga semakin berperan dalam kegiatan politik dan parlemen tidak memiliki daya lawan yang kuat sehingga Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit 5 Juli 1959, yang secara resmi menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, undang-undang yang diharapkan dapat menangkap kembali semangat revolusi dan jiwa persatuan nasional (Said, 2001:xx). Proses ini banyak melalui pertimbangan dari pemerintah, kembalinya UUD 1945 adalah gagasan politik A. H. Nasution dalam menjaga kestabilan pemerintah akibat saling serang golongan partai politik satu dengan yang lain yang hampir menimbulkan perpecahan.

6.1.1 Gagasan kembali UUD 1945

Dalam usaha merealisasikan gagasan-gagasan pertahanan politik serta konsep pertahanannya, langkah berikutnya Nasution setelah pidato Jalan Tengah mulai mengintensifkan usaha kearah di berlakukanya UUD 1945. Gagasan Nasution memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 secara terbuka mulai dikemukakan ketika berkampanye sebagai calon IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) untuk Dewa Konstituante menjelang pemilihan umum 1955 (Said, 2001:30). IPKI di bentuk oleh A. H. Nasution semasa non-aktif dari militer, akibat dari peristiwa 17 Oktober 1952 (mendesak Presiden membubarkan DPR karena dianggap telah banyak ikut campur dalam masalah TNI-AD).

Menurut A. H. Nasution timbul kecemasan mengenai nasib “Negara Proklamasi” di kalangan para perwira waktu itu. Bagi A. H. Nasution serta kawab-kawannya yang diberhentikan sementara dari dinas militer karena terlibat Peristiwa 17 Oktober 1952, dan berkumpul dalam IPKI, “Negara Proklamasi” hanya bisa dipertahankan jika UUD 1945 diberlakukan kembali. Maka dari itu lahirlah IPKI yang akan ikut dalam pemilu, terutama untuk Konstituante guna

memperjuangkan kembali UUD 1945, sebagai jalan keluar dari frustrasi masa itu (Said, 2001:32)

Pada perkembangan berikutnya, nyatanya Dewan Konstituante tidak sanggup mencapai kesepakatan dalam menanggapi seruan pemerintah untuk memberlakukan kembali UUD 1945. A. H. Nasution sebagai Penguasa Perang, mengambil tindakan pada bulan Juni 1959 membekukan semua aktivitas politik di Indonesia. Pada moment tersebut, ia bersama masa pemuda serta para anggota golongan karya lainnya mendesak Presiden Soekarno untuk mendeklasikan berlakunya kembali UUD 1945. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mendeklarasikan berlakunya kembali UUD 1945 di depan massa yang antara lain dikerahkan oleh tentara untuk memadati halaman depan Istana Merdeka.

Nasution memuji UUD 1945 dari sudut pandang militer. Mengenai Konstitusi tahun 1945 itu, sebelum terjun sebagai tokoh IPKI, A. H. Nasution menyatakan ditinjau dari sudut keperluan perang, maka sistem UUD 1945 yang terbaik. Menurut tafsiran A. H. Nasution dibawah UUD 1945 kepemimpinan militer berada dalam satu tangan bersama kepemimpinan politik, hal yang memudahkan pemimpin tentara untuk berurusan dengan hanya satu orang. Pandangan A. H. Nasution yang demikian tidak boleh dipisahkan dari pengalamannya menyaksikan kesemrawutan jalur kepemimpinan militer di masa perang mengusir pemerintah kolonial Belanda. Kesemrawutan itu bermula ketika sistem parlementer di berlakukan pada bulan November 1945, sementara UUD 1945 tetap dipertahankan (Said, 2001:32). Akibat dari perubahan sistem demokrasi tanpa perubahan dari konstitusi itu, muncul dengan apa yang disebut berebut tentara antara Presiden, Panglima Besar, dan Menteri Pertahanan.

Adapun penjelasan resmi golongan militerdi kemudian hari mengenai usaha mereka memperjuangkan berlakunya UUD 1945 adalah karena menurut konstitusi RIS, Dwifungsi ABRI dianggap inkonstitusional, karen UUD 1945 tidak mengatur tentang masalah itu, bahkan esensinya melarang ikut sertanya tentara dalam biadng politik (Said, 2001:34).

Presiden Soekarno pada mulanya menurut A. H. Nasution ragu menerima gagasan A. H. Nasution untuk kembali ke UUD 1945. Keengganan tersebut mengingatkan pada penolakan Presiden Soekarno kepada desakan pimpinan Angkatan Darat agar pemerintah membubarkan DPR pada tanggal 17 Oktober 1952. Soekarno pada mulanya lebih cenderung melakukan reformasi, simplifikasi partai-partai dan ideologi, serta restrukturisasi parlemen. Keengganan Presiden Soekarno menghancurkan partai-partai sebagai yang diinginkan A. H. Nasution lewat pemberlakuan kembali UUD 1945. Hal ini mungkin disebabkan oleh keraguan diri Presiden Soekarno terhadap kemampuannya mengontrol militer yang akan menjadi sangat kuat jika partai-partai hancur (Said, 2001:41) Sebagai pembanding kekuatan militer setelah diberlakukan kembali UUD 1945, akhirnya Presiden Soekarno menggandeng PKI yang loyal terhadap kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno.

Dampak dari adanya dekrit Presiden tersebut ialah berubahnya sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Hal itu memberi peran amat besar kepada Presiden Soekarno dan membuat lemahnya posisi partai-partai sedangkan untuk kaum militer telah jelas tampak legalitas yang lebih kuat untuk terlibat dalam politik. Wacana politik tentang Demokrasi Terpimpin yang dilengkapi dengan konsep persatuan nasional berdasarkan Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), dan peran politik militer sangat mendominasi pada masa itu.

6.1.2 Doktrin Perang Wilayah

Bagaimana doktrin wilayah disebut sebagai salah satu upaya A. H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi. Lewat pelaksanaan Doktrin ini, tentara akhirnya dapat menjaga sebuah pola hubungan sipil dan militer dari semua tingkatan pemerintah, dari pusat hingga ke tingkat paling bawah. Dua peran sosial-politik yang dimiliki oleh tentara Indonesia dalam perjalanannya sukses untuk menghalau ancaman dari luar maupun Nasional, begitu kemudian hari dwifungsi juga sukses untuk melanggengkan pemerintahan Orde Baru. Disini dwifungsi dikemas oleh para pimpinan militer melalui Doktrin Perang Wilayah.

Dalam rangka pengembangan konsep-konsep militer dan politik sebagai akibat meluasnya peran politik tentara, A. H. Nasution sebagai KSAD pada tahun

1960 memerintah Seskoad merumuskan pengalaman gerilya TNI yang telah diuraikan dalam sejumlah bukunya kedalam bentuk doktrin-doktrin militer. Maka lahirlah Doktrin Perang Wilayah pada bulan Desember 1960. Perang Wilayah adalah perang yang bersifat semesta, yang menggunakan seluruh kekuatan nasional secara total, dengan mengutamakan kekuatan militer sebagai unsur kekuatannya, agar dengan *counter offensive* dapat menentukan kesudahan perang untuk mempertahankan kedaulatan negara (Said, 2001:44-45).

Doktrin Perang Wilayah berakar jauh kedalam sejarah TNI. Perang Wilayah yang merupakan nama baru bagi sistematisasi berbagai pengalaman dan praktik perang gerilya melawan Belanda di zaman revolusi fisik 1945-1949 sebenarnya tidak pernah sepenuhnya ditnggalkan oleh TNI. Nasution pada tanggal 20 Juli 1950 menandatangani surat keputusan No. 83/KSAD/ Pnt/50 yang membagi wilayah Indonesia kedalam tujuh wilayah militer yang masing-masing disebut Tentara dan Teritorium (T&T) (Said, 2001:45). Pembagian wilayah teritorium tersebut berdasarkan pada kebijakan pertahanan yang berdasarkan pengalaman perang gerilya yang menekankan kemampuan setiap daerah dalam mempertahankan wilayahnya masing-masing.

Berkaca dari pengalaman perang gerilya, pada tahun 1958, ketika sedang menumpas pemberontakan PRRI yang berubah dari perang konvensional menjadi perang gerilya, A. H. Nasution membentuk Panitia Doktrin Angkatan Darat dengan Letkol Rukminto sebagai ketuanya. Menghadapi para pemberontak di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara hanya akan berhasil jika mendapat dukungan rakyat seperti yang dialami TNI pada masa perang gerilya melawan Belanda dahulu. Hasil kerja Panitia Doktrin inilah yang mempercepat lahirnya Doktrin Perang Wilayah.

Bersamaan dengan selesainya perumusan Doktrin Perang Wilayah di Seskoad pada tahun 1960, dibentuk pula Komando Distrik Militer (Kodim) di hampir semua ibukota daerah tingkat II. Dengan dipelopori oleh Siliwangi, Komando Rayon militer (Koramil) dibentuk di setiap kecamatan pada tahun berikutnya. Pada tahun 1963 untuk setiap desa tentara menempatkan sejumlah bintara yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa). Dengan cara

seperti itu maka pada akhir 1963 seluruh wilayah Indonesia sudah hampir sempurna dikontrol oleh militer dengan menggunakan aparat teritorial mereka (Said: 2001:47).

Sebagai dampak dari adanya doktrin-doktrin yang ada, menjadikan rezim Demokrasi Terpimpin sebagai suatu rezim yang memberi kesempatan legal bagi tentara memainkan peran politik. Melalui pelaksanaan Doktrin Pembinaan Wilayah, yang dikemudian hari juga dikembangkan, membuat terciptanya pola baru oleh TNI tentang hubungan sipil-militer dalam semua tingkat pemerintahan dari pusat hingga ke tingkat paling bawah (Said, 2002-44-49). Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwasanya untuk Doktrin Perang Wilayah menurut A. H. Nasution bukanlah sesuatu yang permanen. Menurutnya, doktrin tersebut hanya akan dipakai selama kondisi yang ada belum sanggup membangun pertahanan yang konvensional.

Perkembangan setelahnya, terjadi ketegangan antara tentara dan Soekarno karena perbedaan pendapat dalam urusan Nasakom. Kampanye Nasakom oleh Presiden Soekarno oleh TNI dianggap menguntungkan golongan Komunis. Dari pihak Soekarno sendiri tidak menginginkan untuk menjadi “tawanan” Angkatan Darat, sehingga memilih strategi untuk mengimbangi TNI dengan merangkul PKI. Hubungan menegang antara Soekarno dan Angkatan Darat juga berpengaruh dengan hubungan pribadi antara Soekarno dan A. H. Nasution. Akhirnya karena dianggap sebagai penghalang politik Soekarno posisi A.H. Nasution digantikan dengan Ahmad Yani, salah seorang asisten A.H. Nasution di Markas Besar Angkatan Darat, pada bulan Juni 1962.

Salah satu langkah yang diambil Soekarno dalam menghadapi Angkatan Darat adalah menggalakkan persaingan antar Angkatan (inter-services rivalry). Hal ini membuat Pimpinan Angkatan Darat waktu itu secara politis “dikepung” oleh Soekarno dengan menggunakan PKI, tiga Angkatan (Laut, Udara, dan Kepolisian), serta sejumlah perwira Soekarno di dalam Angkatan Darat sendiri. Dengan adanya hal tersebut, maka diadakanlah Seminar Angkatan Darat I di Bandung pada bulan April 1965. Dalam seminar tersebut menghasilkan Doktrin Tri Ubaya Cakti yang terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Doktrin Kekaryaannya TNI, menjelaskan jati diri dan cita diri mereka sebagai “anak revolusi”, “tentara rakyat”, “tentara pejuang”, dan kekuatan “progresif revolusioner”, yang salah satu tugasnya adalah membela dengan gigih hingga titik darah penghabisan: Sang Saka Merah putih, Bhinneka TunggalIka.Pancasila, Manipol/USDEK dan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno dengan ajaran-ajarannya;
2. Doktrin Perang Revolusi Indonesia, menekankan bahwa hakikat Perang Revolusi Indonesia adalah “perlawanan adil yang bersifat semesta dan dilakukan secara ofensif-revolusioner tanpa kenal menyerah yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia sebagai bagian dari Perjuangan Umat Manusia terhadap OLDEFO (olde emerging forces) – NEKOLIM (neokolonialisme), untuk mencapai tujuan Revolusi Indonesia dan tujuan membentuk unia Baru yang adil,makmur, dan bersih dari penindasan dan penghisapan;
3. Doktrin Pembinaan Potensi Perang-Revolusi Indonesia, menekankan perlunya penggalangan kekuatan-kekuatan progresif-revolusioner domestik dan internasional dalam menghadapi ancaman nekolim. Tugas pokoknya adalah menghimpun secara maksimal semua potensi yang laten, semua daya dan dana di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam sistem persenjataan sosial dan sistem persenjataan teknologis, untuk menyusun dan memperoleh kekuatan, kesiagaan daya tahan serta mengerahkannya guna menjamin kelangsungan dan tercapainya tujuan revolusi.

A. H. Nasution sejak bulan Juni 1962 tidak lagi memimpin Angkatan Darat. Dengan tanpa adanya posisi pimpinan Angkatan Darat, membuat dirinya tidak memainkan peranan dalam seminar tersebut. Menurutnya, seminar Angkatan Darat yang ada merupakan upaya pimpinan Angkatan Darat menyesuaikan Doktrin politik TNI kepada yang dikehendaki Presiden (Said, 2002:56-64). Melihat kondisi yang ada, kedepannya Angkatan Darat terus berupaya membersihkan doktrin mereka dari jargon kiri dan Soekarnoisme, yakni setelah

mereka secara drastis memusnahkan PKI sembari secara canggih dan perlahan-lahan menyingkirkan Soekarno.

Doktrin Perang Wilayah menjadi salah satu upaya A. H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi agar tentara ikut terus dalam mengambil peran-peran sosial-politiknya melalui doktrin Perang Wilayah. Pengalamannya selama revolusi fisik bersama rakyat mengkristalkan sebuah gagasan, tentu ini diterima baik oleh masyarakat sebagai sebuah tindak pengamanan dari kemungkinan-kemungkinan ancaman dari luar maupun nasional. Namun perlu di garis bawah bahwa doktrin Perang Wilayah tidak bersifat permanen, ini dilakukan karena militer Indonesia masih belum sanggup membangun pertahanan konvensional.

6.2 Masa Periode Orde Baru

Upaya yang dilakukan A. H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah upaya pelurusan pelaksanaan dwifungsi dalam pemerintahan. Praktis pasca meletusnya peristiwa Gerakan 30 September, dimana A. H. Nasution menjadi salah satu daftar nama dari sasaran operasi ini, peran dalam kemiliteran dan perpolitikan perlahan dilucuti oleh Pemerintah Orde Baru. Implementasi dwifungsi pada masa Orde Baru banyak menabrak prinsip-prinsip dari *Jalan tengah* sebagai embrio dwifungsi.

Puncak ketegangan antara Angkatan Darat dengan PKI dan Soekarno terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Sehari sebelumnya yakni pada tanggal 30 September terjadi peristiwa berdarah yang di Indonesia pada umumnya dikenal dengan peristiwa Gerakan Tiga Puluh September atau Gestapu/PKI. Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu dari korban peristiwa tersebut. Kejadian tersebut kemudian menjadi penyebab hancurnya PKI dan merosotnya secara drastis kekuatan politik Soekarno. Latar belakang itulah yang menjadikan semakin dominannya peran politik ABRI, khususnya Angkatan Darat. Peran politik dominan yang ada dikonsolidasikan oleh tentara melalui Seminar Angkatan Darat II di Bandung pada bulan Agustus 1966.

Salah satu yang dihasilkan dari Seminar Angkatan Darat II adalah keputusan kaum militer Indonesia untuk makin memperteguh posisi mereka

sebagai kekuatan politik. Doktrin *Tri Ubaya Cakti* ditata dan dirumuskan kembali ke dalam 4 bagian sebagai berikut:

- 1) Doktrin Pertahanan Darat Nasional (Hanratnas): mengatur penggunaan pelibatan Angkatan Darat dalam berbagai operasi militer, di samping tugas untuk ikut serta dalam penyelesaian revolusi Indonesia;
- 2) Doktrin Kekaraan: menekankan bahwa TNI-Angkatan Darat sebagai golongan arya berkehendak mengambil bagian yang aktif dalam “membina segala kehidupan nasional, menuju tercapainya cita-cita pembentukan Dunia Baru, serta melindungi kepentingan-kepentingan nasional;
- 3) Doktrin Pembinaan: mengatur pembentukan kekuatan, kesiapan dan ketahanan di bidang ideologi, agama, sosial-budaya, dan sosial-militer; dan
- 4) Doktrin Perang Rakyat Semesta (Perata): perincian dari uraian perencanaan dan pelaksanaan perang rakyat semesta yang mengandalkan kekuatannya pada perlawanan rakyat dengan tentara sebagai intinya (Said, 2002:67-70).

Para perwira yang mengikuti seminar juga memberi sumbangan gagasan mengenai pemilu, kepartaian, keormasan, dan kekayaan. Dalam urusan tersebut, ditegaskan agar istilah Demokrasi Terpimpin digantidengan istilah Demokrasi Pancasila. Selain itu, semua ideologi dari partai, organisasi massa, dan golongan karya juga berlandaskan Pancasila. Para perwira yang menyumbangkan gagasan itu juga memilih pemilihan umum sistem distrik, dan bahwa militer yang ikut pemilu dan terpilih status militernya tetap ada / tidak dinonaktifkan.

Jalan pikiran A.H. Nasution sendiri juga sudah terwakilkan di dalam seminar yang diselenggarakan oleh Angkatan Darat tersebut. Salah satu gagasannya ialah tentang Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi partai, organisasi kemasyarakatan dan golongan karya. Bebearapa hari setelah seminar tersebut, ia menerbitkan sebuah buku yang mengungkapkan pengkhianatan PKI, kebobrokan Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama pimpinan Soekarno, serta peran ABRI dalam menegakkan demokrasi. Ia juga berbicara tentang Sapa Marga

sebagai rumusan akhlak tentara yang akan membentengi ABRI dari kemungkinan menegakkan militarisme dan juntaisme. Menurutnya, militarisme dan juntaisme adalah sistem asing yang dimusuhi oleh Sapta Marga (Said, 2002:71-72).

Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) selanjutnya mengupayakan agar terjadinya integrasi ABRI. Hal itu dilakukan sebagai usaha mencegah terulangnya politisasi rivalitas antar-Angkatan. Langkah pertama yang diambil adalah dengan mengadakan seminar sembilan hari guna membicarakan untuk pertama kalinya sebuah doktrin untuk ABRI. Seminar tersebut diselenggarakan pada bulan November 1966 di Jakarta dan menghasilkan Catur Dharma Eka Karma (CADEK), yang inti sesungguhnya adalah sistematisasi dari doktrin Tri Ubaya Cakti yang kemudian ditingkatkan menjadi doktrin untuk seluruh ABRI.

Doktrin Cadek akhirnya diresmikan pada tanggal 27 Februari 1988 oleh Panglima ABRI, Jenderal L.B. Moerdani. Selama 22 tahun berlalu semenjak diadakannya seminar telah diadakan sejumlah penyesuaian serta melewati sejumlah rapat dan sarasehan. Doktrin Cadek resmi diberlakukan dengan surat keputusan No:Kep/04/II/1988. Dalam Cadek versi Moerdani dijelaskan bahwa “Dwifungsi ABRI merupakan ciri-ciri keterlibatan dan penampilan fungsional yang dimiliki dan melekat pada diri ABRI sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan Sospol, sesuai dengan tujuan perjuangan ABRI dalam kerangka perjuangan nasional untuk mencapai tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” (Said, 2002:73-74).

Sekretarian Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sebagai kendaraan militer didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Pendirian itu bertujuan guna menghadapi pemilu pertama pasca rezim Soekarno, ABRI yang sudah bertekad mendukung pemerintahan Orde Baru. Agar tidak ada kekacauan politik pasca gestapu berlarut-larut, Jenderal Soeharto dengan cepat melakukan pembersihan terhadap elemen kiri dan Soekarnoisme dalam militer dan organisasi-organisasi politik. Menjelang pemilu 1971 Golkar sudah menjadi suatu kesatuan solid yang sudah sepenuhnya dikontrol tentara dan perwira-perwira kepercayaan Presiden Soeharto telah ditempatkan pada semua posisi yang menentukan dalam partai

pemerintah tersebut. Akhirnya, hasil dari pemilu 1971 Golkar memenangkan pemilihan tersebut dengan besar suara 62,8%.

Pekerjaan politik militer belum selesai dengan Golkar sebagai mayoritas tunggal. Sebagaimana yang digagas A.H. Nasution maka langkah selanjutnya ialah penyederhanaan partai-partai. Dalam waktu singkat, di bawah tekanan yang nyaris tidak mungkin diatasi oleh para politisi, di Indonesia tumpah rupa partai-partai baru hasil gabungan banyak partai peserta Pemilu 1971. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah hasil gabungan partai nasionalis, Kristen/Katolik serta partai-partai yang sekuler lainnya. Sedang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah hasil penggabungan semua partai Islam yang ada sebelumnya.

Dengan beragam konsep dan penjelasan baik dari lembaga resmi ataupun perseorangan, pemerintah Orde Baru yang dibangun, didukung, dan dipertahankan oleh ABRI, makin lama dilihat masyarakat terutama sebagai alat golongan militer untuk mendominasi seluruh aspek kehidupan. Berbagai kritik mulai dimunculkan yang ditujukan kepada ekspansi kekuasaan militer pada awal Orde Baru. Akhirnya pada tahun 1971, A.H. Nasution menerbitkan sebuah buku yang membahas mengenai peran politik TNI. Sembari membela Dwifungsi, ia juga melihat adanya kelemahan-kelemahan pelaksanaan peran politik militer tersebut, mengidentifikasi berbagai sikap masyarakat terhadapnya, untuk selanjutnya mencoba memperjelas doktrin ciptaannya serta mengemukakan saran-saran perbaikan pelaksanaannya (Said, 2002:84-88).

A. H. Nasution melihat bahwa kritik perngkayaan tentara di bidang ekonomi mendapat sorotan dan kritik paling banyak. Hal ini dilihat oleh para pengkritik sebagai pengurangan lapangan kerja buruh, dan dalam pemerintah mengurangi atau menutup kemungkinan-kemungkinan terhadap karir-karir pegawai negeri karena dominasi militer dengan pengkaryaan yang mengakar sampai bawah.

Penyelewengan yang terjadi pada TNI seperti pemberian fasilitas-fasilitas istimewa, perbuatan-perbuatan korupsi dan lain-lain. A. H. Nasution menangkap munculnya kekecewaan masyarakat terhadap peran politik tentara. Kekecewaan ini melahirkan tekanan untuk paling sedikit mengurangi peran politik tentara,

apabila belum bisa dihapus. Terhadap fenomena ini A. H. Nasution tegas dan keras menyatakan bahwa tentang pengeritan dan pengalaman serta persyaratan-persyaratan tata pelaksanaan dan tata konstitusional. Sebenarnya istilah dwifungsi kurang sesuai (pelaksanaan dwifungsi yang tidak sesuai selama Orde Baru). Melihat dari sejarah, dwifungsi dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kesanggupan dan kemampuan yang ditentukan oleh kebutuhan Republik dari masa kemasa (Said, 2001:89).

Kecemasan generasi tua militer Indonesia terhadap kemungkinan terjadinya perubahan dalam kepribadian generasi muda TNI, akibat keterlibatan total mereka dalam politik dan bisnis, adalah faktor pendorong diadakannya Seminar Angkatan Darat ke III. Seminar itu berlangsung pada tanggal 13-18 Maret 1972 di Seskoad, Bandung. Seminar tersebut menghasilkan Dokumen Dharma Pusaka '45, yang pada dasarnya merupakan manifestasi kecemasan Generasi '45 TNI terhadap sebagian generasi muda ABRI yang waktu memasuki ABRI didorong oleh motif ekonomi finansial. Untuk mengatasi kecemasan mereka itulah maka Generasi '45 militer Indonesia itu merumuskan nilai-nilai perjuangan mereka, membakukannya dalam bentuk buku petunjuk yang selanjutnya mereka wariskan kepada Generasi TN pasca '45.

Sementara itu, invasi militer ke dalam wilayah yang awalnya didominasi kaum sipil berlangsung makin deras dan mencolok. Posisi-posisi dalam pemerintahan makin lama jatuh ke tangan militer. Pada tahun 1977, sebanyak 53,5% posisi tinggi negara sudah diduduki oleh tentara. Dan pada tahun 1981, dalam laporannya kepada Rapat Pimpinan (Rapim) ABRI di Ambon, Kepala Staf Kekaryaan Hankam, Letjen. TNI Mohammad Kharis Suhud menyebutkan angka 8025 sebagai jumlah anggota ABRI yang ditugas-karyakan diposisi-posisi strategis. Mereka yang dikaryakan itu antara lain menduduki jabatan-jabatan: 28 Duta Besar (dari 63 jabatan Duta Besar yang tersedia); 4 Konsul Jenderal (dari 16 jabatan Konsul Jenderal yang ada); 18 Gubernur (dari 27 jabatan gubernur yang harus diisi); 130 Bupati (dari 241 jabatan Bupati yang ada); 14 Sekjen Departemen (dari 19 jabatan yang tersedia); 18 Dirjen (dari 61 kursi Dirjen yang ada); 15 Inspektur Jenderal (dari 19 kursi yang harus diisi); 8 Kepala Lembaga

(dari 18 lowongan yang tersedia); Asisten Menteri dan Sekretaris Menteri sebanyak 21 (dari 25 jabatan yang tersedia).

Makin banyaknya posisi sipil yang diduduki militer mula-mula dibenarkan dengan alasan banyak kekosongan yang ditinggalkan oleh pembersihan atas orang-orang komunis dan golongan Soekarno setelah Gestapu. Tapi ketika Soeharto makin mengkonsolidasikan kekuasaannya, para perwira militer yang tidak diinginkan di lingkaran kekuasaan terpaksa harus dicarikan tempat pada jabatan-jabatan sipil. Di samping itu penempatan seorang perwira di jabatan sipil juga merupakan suatu cara Soeharto membagi “hadiah” kepada orang yang loyal kepadanya (Said, 2002:94-95).

Dominasi tentara dalam kehidupan sosial-politik inilah yang berlangsung di tengah-tengah makin representifnya pemerintah Orde Baru semakin meningkatkan keresahan masyarakat yang kemudian memicu berbagai kecaman terbuka. Sementara aksi-aksi mahasiswa makin terbuka mengkritik praktik otoriter pemerintahan Soeharto yang menggunakan dan didukung tentara. Terlebih pada tahun-tahun pertama dekade sembilan puluhan semakin terasa pengaruh keterbukaan dunia sebagai akibat runtuhnya tembok Berlin dan ambruknya Uni Soviet.

Salah satu topik kritik dan kecaman yang menonjol di awal tahun sembilan puluhan adalah menyangkut kepemimpinan ABRI serta kedudukannya di lembaga legislatif. Mengenai keanggotaan ABRI di DPR, sejumlah akademisi mempertanyakan jumlahnya, bahkan mereka mempersoalkan kehadiran mereka dalam jumlah besar tanpa melalui proses pemilihan umum. Kritik dan kecaman tersebut mengundang tanggapan dari Presiden Soeharto. Menurutnya, kehadiran ABRI di legislatif bukan sekedar mewakili kepentingan ABRI, melainkan juga mewakili misi ABRI yang bertolak dari kepercayaan rakyat kepada ABRI.

Sebelumnya pada sebuah kesempatan, Soeharto menjelaskan bahwa kehadiran ABRI di MPR juga berguna untuk mencegah penggunaan senjata apabila terjadi ketidakpuasan ABRI terhadap strategi dan undang-undang yang ada. Dengan diwakilinya ABRI di legislatif, menurut Presiden Soeharto, apabila ABRI merasa tidak puas terhadap strategi pembangunan berdasarkan GBHN,

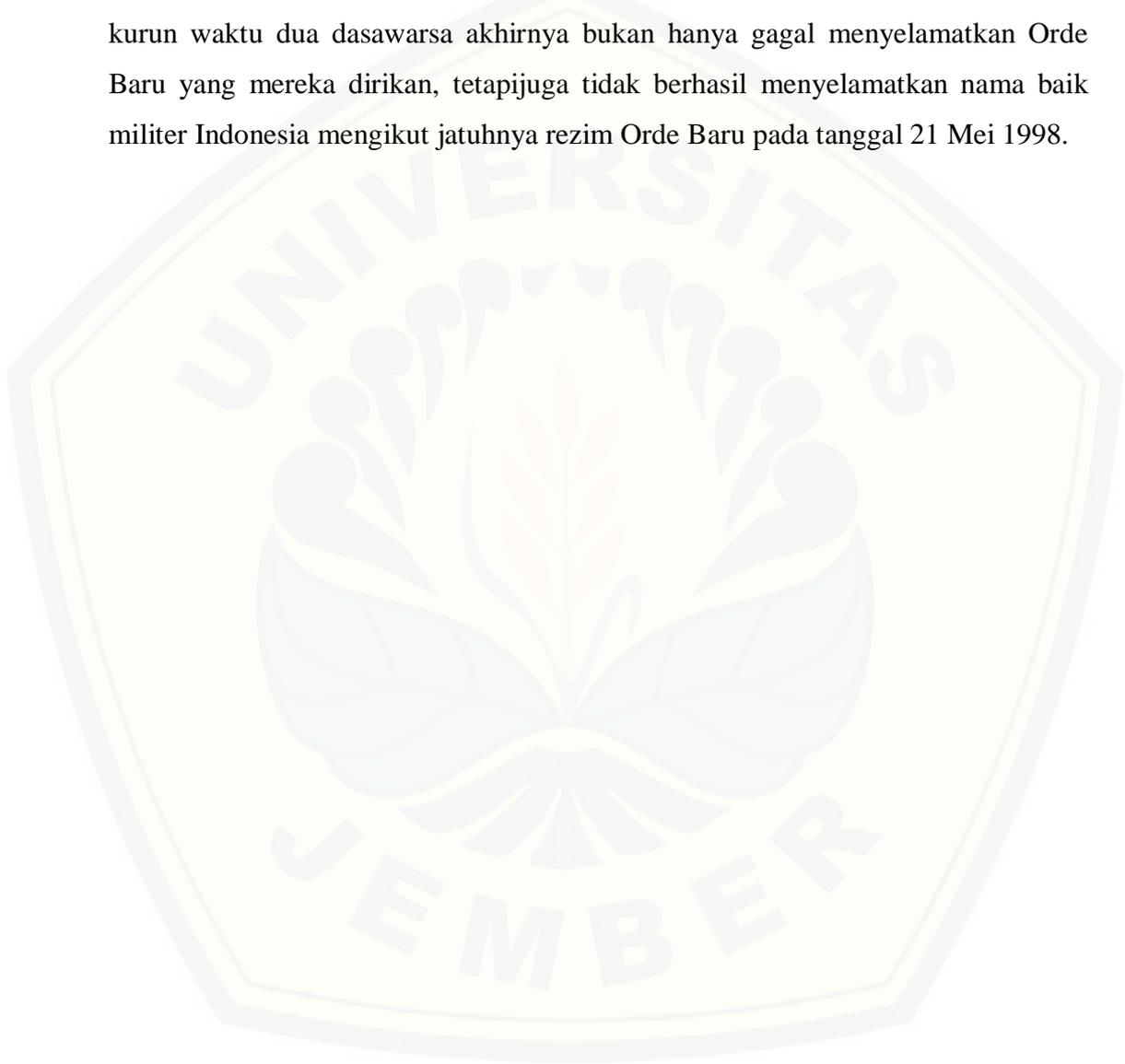
maka ABRI bisa menyalurkan ketidakpuasannya itu melalui MPR, bukan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan lainnya.

Mengenai hak Angkatan Bersenjata mendapatkan tempat di lembaga-lembaga legislatif, Soeharto mendasarkan pada tafsiran Orde Baru terhadap Dwifungsi. Menurutny saat itu ABRI diakui sebagai kekuatan sosial politik yang setara dengan kekuatan politik lainnya. Berbeda dengan posisi ABRI pada saat Orde Lama dimana keterlibatan sosial politik ABRI berkaitan dengan *civiv mission*, kekaryaan, ABRI ditempatkan pada masa itu karena dibutuhkan (Said, 2002:145-147).

Tahun-tahun menjelang berakhirnya dekade sembilan puluhan ditandai oleh meningkatnya kesibukan militer mendiskusikan peranan politik mereka dalam masyarakat Indonesia yang mereka sadari telah berubah dan dunia internasional yang telah meninggalkan era Perang Dingin dengan segala konsekuensinya. Berbagai dinamika yang diakibatkan oleh perkembangan domestik dan Internasional itu dibahas oleh banyak jenderal dalam sejumlah seminar dan sarasehan.

Menyadari tingginya gelombang perubahan di suatu pihak, sementara di pihak lain para Jenderal masih belum pada tingkat mempercayai kekuatan sipil, maka yang bisa dilakukan oleh para pemikir tentara itu adalah mendiskusikan berbagai gagasan yang bertolak dari posisi perlunya perubahan dan penyesuaian pelaksanaan peranan politik mereka. Mereka tidak menyadari bahwasanya perubahan yang perlu dilakukan adalah dari dalam tubuh militer sendiri. Para perwira tinggi yang sibuk di berbagai seminar dan sarasehan itu tidak lagi seperti pada tahun 1966, dimana mereka secara bersama merumuskan pikiran, menyumbangkannya kepada Kabinet Ampera yang oleh ketuanya yakni Jenderal Soeharto diterima dan diperhatikan. TNI pada dasawarsa terakhir Orde Baru adalah TNI yang tetap melanjutkan tradisi berseminar dan berdiskusi di berbagai Sesko, akan tetapi yang harus mereka kerjakan adalah keputusan dan kemauan Presiden Soeharto, bukan keputusan dari hasil seminar mereka (Said, 2002:166-167).

Sekitar dua dasawarsa setelah Seminar Angkatan Darat II, hubungan TNI dengan Presiden Soeharto sudah berbalik hampir sempurna. Melalui proses panjang disertai kecanggihan politik yang makin menaik, Soeharto makin kuat dan tentara makin lemah di hadapan Presiden Soeharto. Dengan latar belakang tersebut berbagai gagasan dan pemikiran para perwira TNI yang tersebar dalam kurun waktu dua dasawarsa akhirnya bukan hanya gagal menyelamatkan Orde Baru yang mereka dirikan, tetapi juga tidak berhasil menyelamatkan nama baik militer Indonesia mengikut jatuhnya rezim Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998.



BAB 7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 4, 5, dan 6 dapat ditarik kesimpulan serta jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan yang pertama adalah kondisi sosial budaya, kondisi politik, dan kondisi ekonomi, sangat berpengaruh terhadap pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI. Kondisi sosial budaya yang meliputi kondisi lingkungan keluarga dan kondisi lingkungan pendidikan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan pola pikir A. H. Nasution. Kondisi Lingkungan keluarga yang sederhana, taat terhadap nilai-nilai agama dan memiliki silsilah keluarga sebagai pejuang berpengaruh pada cara berpikir A. H. Nasution yang patriotik dan nasionalis. Kondisi lingkungan pendidikan merupakan yang paling maju di distrik tempat A. H. Nasution tinggal mempengaruhi sikapnya yang kritis terhadap perkembangan bangsanya. Kondisi politik juga memberi pengaruh terhadap cara berpikir A. H. Nasution, perang kemerdekaan adalah hasil dari keputusan-keputusan politik. Dari pengalaman-pengalaman masa perang kemerdekaan tersebut, adalah kondisi yang paling banyak memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI. Berawal dari keinginannya berjuang dalam perjuangan militer, hingga ketertarikannya dalam bidang politik, adalah sebuah panggilan hati yang merasa ikut bertanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi yang A. H. Nasution rasakan selama pendudukan Belanda telah mengenalkan A. H. Nasution pada kehidupan perjuangan kelas. Perjuangan antara pribumi dan Orang Belanda yang menjalani pola hidup berbeda, dibawah pendudukan Belanda, pribumi hidup dengan batasan-batasan dan diskriminasi. Kondisi-kondisi tersebut yang membuat A. H. Nasution mencoba untuk menjadi sosok yang ikut berpengaruh dan berperan membuat perubahan-perubahan untuk lepas dari jerat imperialisme dan kapitalisme di bawah pendudukan Belanda.

Kesimpulan kedua yakni mengenai bentuk pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI menurut Nasution adalah dua fungsi

ABRI, yakni fungsi pertahanan dan fungsi sosial politik. Fungsi sosial politik bagi tentara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari proses berdirinya bangsa Indonesia. Tentara Indonesia membentuk dirinya sendiri (organisasi kemiliteran) ketika pemerintah pada masa itu masih enggan membentuk wadah bagi para pejuang ini dibawah satu komando pasca proklamasi kemerdekaan. Fungsi sosial politik yang sejak awal secara tidak langsung telah melekat pada tentara Indonesia, hal ini menjadi dasar dari pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi, bahwa tentara Indonesia berbeda dari dengan tentara profesional seperti di Eropa. Tentara Indonesia merasa ikut bertanggung jawab dalam menentukan haluan negara, mengingat perjuangan pada masa-masa perang kemerdekaan bersama rakyat mempertahankan kemerdekaan. Jalan Tengah merupakan gagasan A. H. Nasution mengenai posisi tentara dalam perkembangan negara pada masa itu, yakni memberikan cukup saluran kepada tentara bukan sebagai organisasi, tapi sebagai perseorangan atau eksponen (perwakilan) dari organisasi militer untuk turut serta menentukan kebijakan negara pada tingkat yang tinggi.

Kesimpulan ketiga mengenai upaya A. H. Nasution dalam mewujudkan dwifungsi ABRI yakni mengusulkan untuk kembali pada UUD 1945 sebagai dasar bagi tentara untuk mengambil peran sosial politiknya. Pada tahun 1950-an Indonesia menganut sistem parlementer, dimana sistem ini mengatur tentara sebagai alat penguasa saja tidak memiliki peranan apapun dalam mengatur kebijakan negara. Penerapan sistem ini merupakan hasil dari kegagalan perjuangan diplomasi dalam menghadapi Belanda yang masih ingin campur tangan atas kedaulatan Indonesia. Sistem yang dianggap sebagai campur tangan atau peninggalan kolonial ini pada akhirnya banyak menimbulkan perpecahan karena lebih mengedepankan kepentingan golongan. Pada akhirnya sistem parlemeter digantikan dengan kembalinya UUD 1945 (menjadi salah satu gagasan dan tuntutan A. H. Nasution) melalui Dekrit Presiden tahun 1959. Upaya selanjutnya adalah Doktrin Perang Wilayah, mengingat pada masa itu terjadi banyak pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah, disepakati untuk membentuk kodim maupun koramil ditiap daerah untuk mengatasi pemberontakan yang terjadi. Hingga pada tahun 1972 (Orde Baru) praktis A. H. Nasution tidak

memiliki kedudukan dalam kursi pemerintahan maupun militer. Meskipun ruang gerak diawasi dan dibatasi oleh rezim Orde Baru, A. H. Nasution tetap mengiringi perjalanan pemerintahan Indonesia, terutama ia banyak mengkritik implementasi dwifungsi yang sudah tidak sesuai dengan konsep Jalan Tengah yang menjadi dasar dwifungsi.

7.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. bagi pembaca, penulisan mengenai pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI dapat dijadikan alternatif untuk sumber belajar menyangkut Sejarah Indonesia, dan sejarah intelektual atau sejarah pemikiran tokoh Indonesia;
2. bagi penulis, penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga untuk para pembaca dapat menambah informasi menyangkut penelitian mengenai sejarah intelektual atau sejarah pemikiran tokoh Indonesia;
3. bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Britton, P. 1996. *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*. Penerjemah oleh Hendrajit. Jakarta: LP3ES.
- Noer, D. 1986. *Perkembangan Demokrasi Kita, dalam Seri Prisma, Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta:LP3ES.
- Fattah, Abdoel. 2005. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hidayat, A.M. 2012. *Kiprah Abdul Haris Nasution Dalam Politik dan Perkembangan Militer Angkatan Darat di Indonesia (1945-1966)*. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Samego, I. 1998. *Bila ABRI Menghendaki Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Bandung: Mizan.
- Istyaningrum. D.F. 2004. *Peran ABRI sebagai kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1997)*. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Juliani, E. 2008. *Militer dan Politik: Studi Tentang Kelompok Pendukung dan Penentang Terhadap Penghapusan Dwifungsi ABRI Tahun 1998-2001*. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Kamil, H.N. 2009. *Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998*. Tidak diterbitkan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Karim, Rusli. 1989. *Peran ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979)*. Jakarta: CV Haaji Masagung.
- Madjid dan Wahyudhi. 2014. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP

- Nasution. 1982. *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid I, Kenangan Masa Muda*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nasution. 1983. *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid III, Masa Pancaroba Pertama*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nasution. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid IV, Masa Pancaroba Kedua*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nasution. 1985. *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid V, Kenangan Masa Orde Lama*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nasution. 1986. *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid VI, Masa Kebangkitan Orde Baru*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nasution. 1984. *Pokok-Pokok Gerilya (Dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa yang lalu dan akan datang)*. Bandung: Angkasa.
- Notosusanto. 1985. *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Sinar Harapan
- Palmer, E.Richard. 2005. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poespoprodjo. 1991. *Logika Scientifika*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pranoto, Suhartono. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pratama, A. N. 2018. *Peristiwa 17 Oktober 1952, Ketika Tank dan Meriam Mengarah ke Istana*. Kompas.com. 12410771:2.
- Sagimun, M.D. 1989. *Mas Trip (Dari Brigade Pertempuran ke Brigade Pembangunan)*. Jakarta: Bima Aksara.
- Said, Salim. 2002. *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*. Jakarta: Aksara Karunia.
- Said, Salim. 2001. *Militer Indonesia dan politik: Dulu, Kini, dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Samego, et al. 1998. *Bila ABRI menghendaki: Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Bandung: Mizan.
- Sjamsuddin, Helius. 2016. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

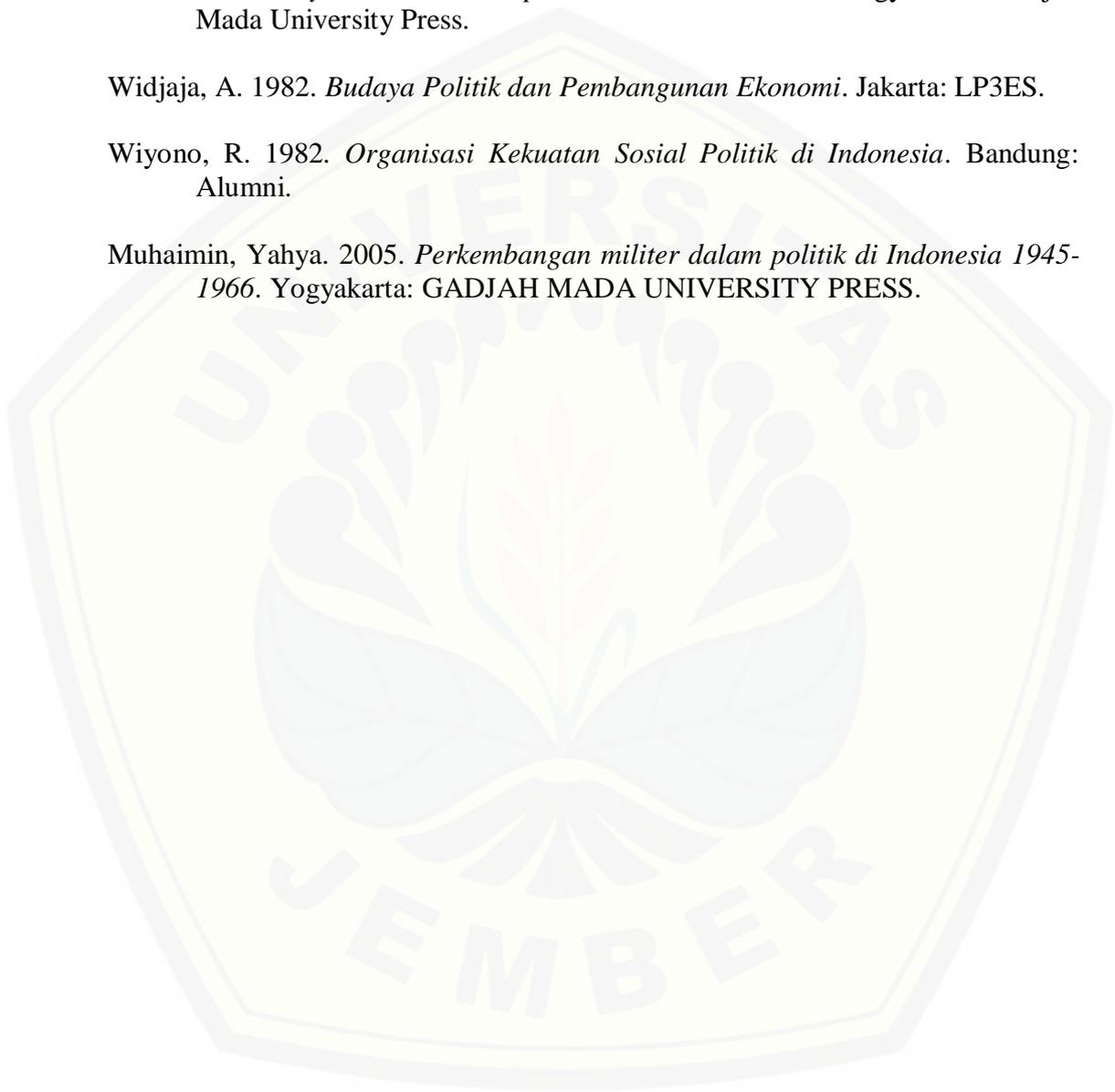
Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*. Penerjemah oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.

Soebijono, Tambunan, dkk. 1992. *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Widjaja, A. 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.

Wiyono, R. 1982. *Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Muhaimin, Yahya. 2005. *Perkembangan militer dalam politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.



Lampiran A

Matrik Penelitian

Topik	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
Sejarah Pemikiran	Pemikiran A.H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998	Penelitian Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang melatarbelakangi munculnya pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI tahun 1958? 2. Bagaimana dwifungsi ABRI menurut pemikiran A. H. Nasution tahun 1958? 3. Bagaimana Upaya A.H. Nasution mewujudkan dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998? 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sumber Primer: Buku Pokok (Memenuhi Panggilan Tugas jilid 1, Memenuhi Panggilan Tugas jilid2, Memenuhi Panggilan Tugas jilid 3, Memenuhi Panggilan Tugas jilid4, Sekitar Perang Kemerdekaan jilid 4 dan 5. b. Sumber sekunder (Tumbuh dan tumbangannya dwifungsi ABRI: Perkembangan pemikiran politik 	<p>Metode Sejarah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Heuristik b. Kritik c. Interpretasi d. Historiografi <p>Pendekatan: Sosiologi Pengetahuan</p> <p>Teori: Teori Hermeutika</p>

militer
Indonesia 1958-
2000, Politik
militer Indonesia
1945-1967,
Pejuang dan
Prajurit:
Konsepsi dan
implementasi
Dwifungsi,
Perkembangan
politik dalam
militer di
Indonesia Tahun
1945-1966,
Militer Indonesia
dan politik: Dulu
Kini dan Kelak,
Dwifungsi ABRI:
Perkembangan
dan Peranannya
Dalam
Kehidupan
Politik Indonesia,

Demiliterisasi

Tentara: Pasang

Surut Politik

Militer 1945-

2004,

Profesionalisme

dan Ideologi

Militer Indonesia,

Bila ABRI

menghendaki.

c. Skripsi

d. Jurnal

e. Dokumen Video

Lampiran B**SAPTA MARGA DAN SUMPAH PRAJURIT****Sapta Marga**

Isi dari Sapta Marga antara lain sebagai berikut.

1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela idiologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia
5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pemimpin serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit Tentara Indonesia, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit

Sumpah Prajurit

Isi dari sumpah prajurit sebagai berikut

1. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
2. Tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau keputusan
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Lampiran C**KIPRAH A. H. NASUTION DALAM MILITER DAN DALAM POLITIK****Pada Masa Hindia-Belanda:**

Tahun 1939- 1940 : Menjadi Guru di daerah Bengkulu kemudian di daerah Palembang Sumatera Selatan.

Tahun 1940-1942 : Cadet Vaandrig Pembantu Letnan/Taruna. Perwira Batalyon Inf. III Surabaya (Pada saat pendaratan tentara Jepang diIndonesia).

Pada Masa Pendudukan Jepang:

Tahun 1943-1945 : Bekerja sebagai pegawai Kotpraja Bandung.

Pada Masa Republik Indonesia:

Tahun 1945 : Kolonel selama setengah Bulan menjabat sebagai Kepala Staf Komandan Jawa Barat, kemudian menjadi Panglima Divisi III/TKR (Priangan).

Tahun 1946 : Panglima Divisi Siliwangi (Jawa Barat)

Tahun 1948 : Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (Kemudian terjadi penurunan pangkat setingkat dalam TNI yaitu Kolonel).

Tahun 1948-1949 : Menejabat sebagai Panglima Komando Jawa

Tahun 1949-1950 : Kepala Staf Angkatan Darat RIS

Tahun 1950-1952 : Kepala Staf Angkatan Darat RI

Tahun 1952 : Dinonaktifkan

Tahun 1955 : 1) Terpilih menjadi anggota Kostituante; 2) Mayor Jendral diangkat kembali menjadi KSAD; 3) ketua GKS (Gabungan Kepala Staf).

Tahun 1958 : Letnan Jendral Anggota Dewan Nasional (mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945).

Tahun 1959 : Menteri Keamanan Nasional/ Menko Hankam/ KASAB.

Tahun 1960 : Jenderal (Anggota MPRS).

- Tahun 1962 : 1) Wakil Panglima Besar Pembebasan Irian Barat; 2) Berhenti menjadi KSAD diangkat menjadi KSAB disamping menjadi Menteri Koordinator Hankam.
- Tahun 1965 : Diangkat kembali menjadi Wakil Panglima Besar sebelum menjadi sasaran G30S.
- Tahun 1966 : 1) Setelah TRITURA (Aksi KAMI) diberhentikan sebagai Menko Hankam/KASAB; 2) Setelah SUPER SEMAR dan diadakan pembaruan Kabinet, kembali diangkat sebentar sebagai Wakil Panglima Besar Komando Ganyang Malaysia (KOGAM)
- Tahun 1966-1972 : Menjabat sebagai Ketua MPRS
- Tahun 1997 : Dianugerahkan Pangkat Kehormatan Jenderal Bintang Lima.

LAMPIRAN D

KUMPULAN FOTO ABDUL HARIS NASUTION



Aku ketika menjadi Siswa Sekolah Raja, Bukittinggi, tahun 1931

Gambar 1 Foto A. H. Nasution

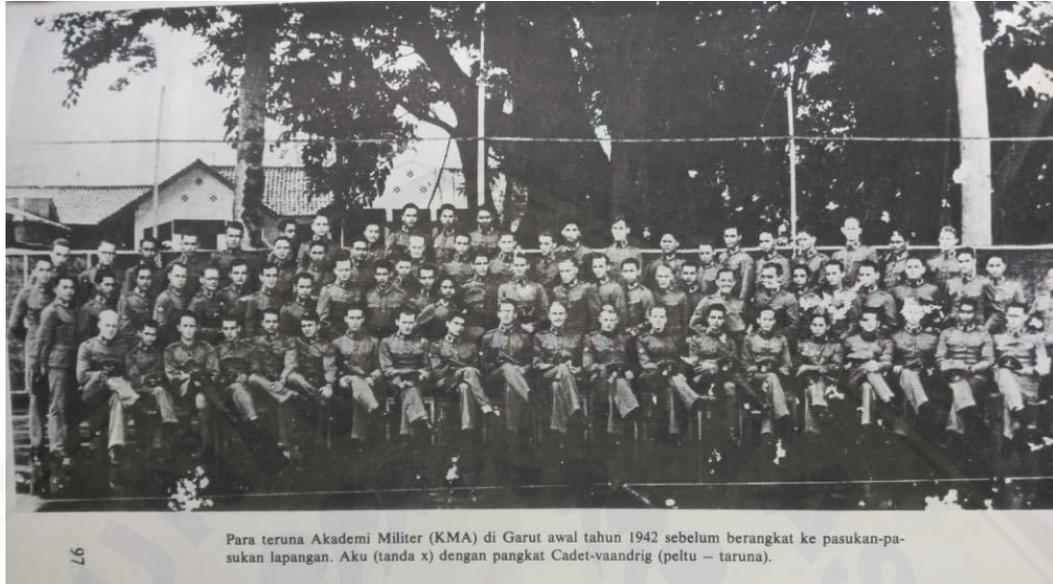
Sumber: *Nasution. 1984. Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta: Gunung Agung



Aku ketika menjabat Panglima TKR Divisi III, permulaan tahun 1945.

Gambar 2 foto A.H. Nasution

Sumber: *Nasution. 1984. Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta: Gunung Agung



Gambar 3 foto A. H. Nasution bersama para taruna Akademi Mliter (KMA)
Sumber: *Nasution. 1984. Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta: Gunung Agung



Gambar 4 A. H. Nasution bersama sang istri
Sumber: *Nasution. 1984. Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta: Gunung Agung



Gambar 5 A. H. Nasution sebagai KSAD

Sumber: Tempo. 2017. *A. H. Nasution: Pejuang dan pemikir*. Jakarta: Kepustakaan Populer Granmedia



Ketika upacara penyerahan Panji-panji Divisi Siliwangi di alun-alun Garut, aku didampingi oleh Kapten Zen (kiri ajudanku) dan Kolonel Hidayat (kanan).

Gambar 6 A. H. Nasution dalam upacara penyerahan panji-panji Divisi Siliwangi
Sumber: *Nasution. 1984. Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta: Gunung Agung